

**NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM PANCASILA
(STUDI PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID)**

Oleh:

Fakrizal

NIM: 18.7.1.211.014

Dosen Pembimbing:

Ammar Fauzi, Ph.D

Skripsi ini ditujukan kepada STAI Sadra sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Penelitian yang berjudul :

Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid)

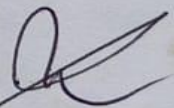
Nama : Fakrizal

NIM : 18.7.1.211.014

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk disidangkan pada sidang skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana harusnya..

Jakarta, 1 Desember 2023



Ammar Fauzi, Ph. D

(Pembimbing Skripsi)


LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

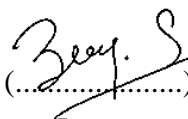
Nama : Fakrizal
NIM : 18.7.1.211.014
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : **Nilai-nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid)**

Telah disahkan oleh Dewan Skripsi:

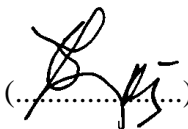
Ammar Fauzi, Ph. D Tanggal:
(Ketua Sidang/Pembimbing)


(.....)


Dr. Benny Susilo, Ph. D Tanggal:
(Dosen Penguji I)


(.....)

Dr. Basrir Hamdani, Ph. D Tanggal:
(Dosen Penguji II)


(.....)

E. Srimulyati, M. Ud Tanggal:
(Sekretaris Sidang)


(.....)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
“Nilai-nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila (Studi Pemikiran
Nurcholis Madjid)”

Disusun oleh:

Fakrizal

NIM: 18.7.1.211.014

Dosen Pembimbing:

Ammar Fauzi, Ph.D

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat memenuhi gelar

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penelitian ini merupakan kerja asli penulis dalam artian bahwa tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila pada kemudian hari terdapat bukti adanya plagiasi, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 29 Desember 2023

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METERAI TEMPEL', and 'SA545AJX017204510'.

Fakrizal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ;	i = ِ	u = ُ
Panjang	: ā = َا;	ī = ِي;	ū = ُو
Diftong	: ay = ِاي;	aw = ِاو	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal في معرفة الله ditulis *fi marifat Allāh*. *Ta’ marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam

posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tasydid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis ‘*aqliyyah*, فعلية ditulis *fi’liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan *tasydid* yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asmā al-husnā, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmanirrahīm

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Semesta Alam, Allah swt, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Tak ada daya dan usaha selain rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. *Salawat* dan salam selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Rasul Muhammad saw, keluarga sucinya dan sahabat setianya, semoga kita semua selalu berada di jalan perjuangannya. Selesainya karya ini tidak terlepas dari peran orang-orang hebat yang telah membantu, membimbing dan mendukung dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr Hossein Muttaqi. selaku Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa.
2. Dr. Khalid Al-Walid, M.Ag. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah memberikan peluang bagi saya untuk melanjutkan studi S1 dan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses pendidikan saya selama berkuliah di STAI Sadra.
3. Ammar Fauzi, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang dengan segenap tenaga, kesabaran dan semangat, membimbing, memotivasi dan mengarahkan saya selama penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Ustadz Hasan. selaku dosen PAWA yang selalu memberikan saran, arahan, dan teguran agar penelitian ini cepat selesai.
5. Para dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di STAI Sadra Jakarta.
6. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu yang tak hentinya mencurahkan semangat, cinta, doa dan dukungan penuh kepada penulis. Juga kepada Almarhum Bapak yang senantiasa menjadi motivasi terbesar penulis dalam menuntut

ilmu dan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra.

7. Kepada kakak senior STAI Sadra yang telah menjadi contoh menyumbangkan ide dan pikiran serta membantu secara morel maupun materiel dalam penyusunan laporan ini.

Dengan doa dan dukungan semuanya, akhirnya proses penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang turut serta dalam penelitian ini dengan balasan yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran untuk membenahinya. Namun, semoga karya sederhana ini bisa memberi sumbangsih dalam pemikiran, kepastakaan maupun di ranah sosial.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 Desember 2023

Fakrizal

ABSTRAK

Kehidupan manusia di era globalisasi mengalami pergeseran nilai dan norma yang menyebabkan munculnya perilaku yang cenderung mengabaikan norma dan etika bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yaitu Pancasila. Krisis kemanusiaan sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal akibat dari paham yang tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Sebagian masyarakat menganggap nilai kemanusiaan sebagai kata biasa dan tidak benar-benar memahami esensi nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan terjadinya fenomena masalah sosial, seperti perundungan. Padahal di Indonesia sendiri, terdapat dasar negara yaitu Pancasila. Apabila dikaji lebih jauh, banyak terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dapat ditemukan dan diaktualkan sehingga dapat mengatasi masalah kemanusiaan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila perspektif Nurcholis Madjid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sila pertama merupakan dasar yang mendalam bagi konsep nilai dan moral. Sila kedua, merupakan asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik, selalu mencari kebenaran dan kebaikan. Pemahaman ini mengakui keberagaman sebagai kekayaan dan menekankan pentingnya sikap ikhlas dalam berbuat baik. Sila ketiga, merupakan prinsip krusial membentuk kerangka untuk mewujudkan keberagaman yang diatur dengan baik. Sila keempat, merupakan hak setiap warga negara untuk bersuara. Musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah bersama mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan, sejalan dengan ajaran agama. Sila kelima, merupakan pemerataan hasil pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Kemanusiaan, Nurcholis Madjid, Pancasila*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
A. Konsonan	v
B. Vokal	v
C. Ta' Marbutah (ة)	v
D. <i>Shaddah</i>	vi
E. Kata Sandang	vi
F. Pengecualian Transliterasi	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Pustaka	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II	16
KAJIAN DASAR MENGENAI HUMANISME DAN PANCASILA	16
A. Humanisme	16
1. Definisi Humanisme	16
2. Sejarah dan Perkembangan	19
3. Dasar-Dasar Humanisme	22
B. Pancasila	27
1. Definisi Pancasila	27
2. Etika Pancasila	30
C. Nilai Kemanusiaan	32
BAB III	37
NURCHOLIS MADJID DAN PEMIKIRANNYA	37
A. Biografi Nurcholis Madjid	37
1. Corak Pemikiran Nurcholis Madjid	41
2. Karya-karya Nurcholis Madjid	43
B. Humanisme Islam	45
C. Nilai-Nilai Pancasila	49
BAB IV	58
ISLAM DAN KEMANUSIAAN DALAM PANCASILA	58
A. Islam sebagai Fondasi Kemanusiaan	58
1. Prinsip Ketuhanan (Keimanan)	59
2. Persamaan Harkat dan Martabat Manusia	60
3. Kebebasan Manusia	66
B. Unsur Pembentukan Kemanusiaan dalam Pancasila	69
1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa	70
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	72
3. Persatuan Indonesia	74

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyaratan Perwakilan	76
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	78
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber nilai bagi masyarakat Indonesia. Peran ini mencakup dua jenis nilai, yaitu nilai dasar dan nilai abadi. Nilai dasar mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga merupakan penjelmaan dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia secara menyeluruh.¹ Pancasila tidak hanya merupakan sekumpulan prinsip atau ideologi yang diterapkan secara abstrak, tetapi juga memiliki akar yang dalam dalam karakter, budaya, dan kebijaksanaan lokal masyarakat Indonesia yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai hasil akumulasi nilai-nilai yang mencerminkan pengalaman, tradisi, dan pemahaman kolektif masyarakat Indonesia selama berjalannya waktu.

Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah esensial untuk setiap warga negara Indonesia. Ini mencakup interaksi sosial, partisipasi dalam politik, pengelolaan ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang memiliki moral yang mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Pancasila, sebagai landasan nilai dan moral yang mengakar, menjelma menjadi fondasi yang

¹ Harsih Rianto, "Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 3, 2016, 80-91.

kuat untuk membawa bangsa Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, memungkinkan harmoni, perdamaian, dan kemakmuran dalam keragaman masyarakatnya.²

Dalam konteks filosofis, sebelum negara Indonesia didirikan, bangsa Indonesia memiliki karakteristik sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia bersatu dalam semangat persatuan dan berkerakyatan. Masyarakat Indonesia ditandai oleh sikap toleransi, suasana damai, saling tolong-menolong, gotong royong, serta selalu bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ini mencintai keamanan, ketentraman, dan selalu menjaga suasana kekeluargaan.³ Berdasarkan pemahaman filosofis tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filsafat negara dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber panduan. Pancasila menjadi sumber nilai yang menyelenggarakan segala aspek kenegaraan, termasuk dalam pembangunan nasional ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pada zaman sekarang, perkembangan tata nilai global menunjukkan adanya fenomena dinamisasi, di mana sekularisme menjadi salah satu bentuk yang signifikan dalam mempengaruhi pandangan manusia terhadap dirinya, lingkungannya, dan eksistensi alam semesta. Secara garis besar, sekularisme adalah sebuah aliran ideologi yang mengusulkan pemisahan institusi atau organisasi dari agama atau kepercayaan. Riset dan teknologi masa kini cenderung menggunakan pendekatan ilmiah dan empiris untuk membenarkan pemisahan ini. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dan dipengaruhi oleh budaya, cenderung kehilangan unsur religiusnya dan lebih cenderung mencakup konsep relativitas dan netralitas. Akibatnya, aturan tersebut akhirnya tidak berlaku dalam fenomena

² Laurensius Airlam, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara", *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, 2018, 58-70.

³ Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), hal. 23

yang ada. Untuk tetap eksis dan berlaku, hukum harus mampu merespons kebutuhan manusia melalui serangkaian aturan dan teks yang terstruktur.⁴

Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir terdapat berbagai permasalahan yang muncul karena semakin berkurangnya rasa nasionalisme dan kebangsaan. Banyak generasi muda atau pemuda mengalami kebingungan identitas, kehilangan arah, dan terlibat dalam kegiatan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mulai dari geng motor, pembunuhan dalam lingkup keluarga, perkelahian antara anak muda, hingga korupsi dan pencucian uang. Dalam era informasi yang viral, isu-isu tersebut dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, terjadi penurunan kualitas nilai-nilai yang pada awalnya menjadi panduan dan penuntun etika masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut mencerminkan hilangnya kualitas hidup suatu bangsa dan karakteristik yang membedakan individu dalam masyarakat. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggungjawab, dan solidaritas, mengalami kemunduran dalam kalangan masyarakat.⁵

Adapun krisis kemanusiaan merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya secara layak hak sebagai seorang manusia, penyebab dari krisis tersebut sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal akibat dari paham yang tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut mungkin saja terjadi disebabkan adanya perbedaan antara kelompok tersebut, baik itu perbedaan etnis, ras maupun perbedaan agama.⁶ Krisis ini mencapai puncaknya dalam kelemahan nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan

⁴ Supriyono dan Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis", *AoEJ: Academy of Education Journal*, Vol. 11, No. 1, 2020, 37-38

⁵ Muhadam, "Ancaman Krisis Nilai", diakses melalui <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1888>

⁶ Syarifuddin dan Zuhra Latifa, Krisis Humanisme Dalam Novel "Al-Dhill Al-Aswad Karya Najib Kailani (Kajian Humanisme Abraham Maslow)", *An-Nahdah Al-'Arabiyah; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, vol. 2, No. 1, 2022, 79

kemanusiaan. Semua ini tidak hanya menggerus dasar-dasar bernegara dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menghancurkan pondasi moral dan etika yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan. Hal ini tentu tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷

Setiap orang harus dengan teguh mau dan mampu terlibat membangun masyarakat persaudaraan yang semakin luas dan inklusif. Menolak setiap tindak kekerasan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya diperlukan pembinaan, kondisi dan fasilitas agar tercipta budaya damai, menghormati hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan, menghargai setiap pribadi, tetapi juga untuk menjamin semakin kuatnya ikatan-ikatan sosial, karena setiap orang harus memperhatikan sesamanya tanpa diskriminasi.⁸ Manusia yang mengutamakan keharmonisan dan keselarasan sebagai ciri khas bangsa, penting untuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila sebagai landasan moral dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat, sebagai bagian dari bangsa, dan sebagai warga negara. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang berarti nilai-nilai Pancasila berakar pada penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila tampaknya memiliki sisi yang berbeda ketika diartikan dalam masyarakat. Beberapa pihak menganggap nilai kemanusiaan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat dilihat dari susunan sila-silanya yang membentuk satu kesatuan. Fakta bahwa ada satu prinsip khusus yang membahas nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa para pendiri

⁷ Awalia Marwah Suhandi, Dini Angraeni Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kalangan Generasi Muda", *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1, 2021, 38

⁸ C. Asri Budiningsih, "Strategi Pembelajaran Nilai yang Humanis", *Dinamika Pendidikan : Majalah Ilmu Pendidikan*, No. 2, 2010, hal. 3

bangsa menganggap nilai kemanusiaan sebagai konsep yang hidup dan relevan dalam masyarakat Indonesia.⁹

Dari paparan di atas, Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk landasan nilai dan moral bagi masyarakat Indonesia. Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, seperti toleransi, harmoni, dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan tata nilai global, di mana sekularisme dan pemisahan antara agama dan kepercayaan semakin berkembang. Pancasila memberikan dasar etika yang kuat untuk masyarakat Indonesia, mempromosikan budaya damai, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menghadapi tantangan seperti penurunan nilai moral, kebingungan identitas, dan krisis kemanusiaan, sehingga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk mengatasi masalah ini dan memajukan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Di Indonesia, Nurcholish Madjid adalah seorang intelektual yang memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang dikenal sebagai New-modernisme di Indonesia. Pemikiran dan gagasannya menjadi rujukan bagi banyak orang dari berbagai latar belakang. Ia terkenal karena keterlibatannya dan perhatiannya yang mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman di Indonesia, termasuk keharmonisan antaragama dan kemanusiaan.¹⁰ Bagi Nurcholis Madjid, setiap individu manusia memiliki nilai yang sangat berharga, setara dengan nilai kemanusiaan tertentu. Tindakan yang merugikan individu, bahkan seperti membunuh tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai kerugian terhadap seluruh umat manusia. Sebaliknya, tindakan baik terhadap individu, seperti membantu mereka, dianggap sebagai kebaikan terhadap seluruh umat manusia,.

⁹ Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya*, (Jakarta: KPG, 2012), hal. 20

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, dkk, *Nurcholis Madjid: Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 102

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu manusia untuk berperilaku baik terhadap sesamanya, memenuhi kewajiban individu terhadap individu lainnya, serta menghormati hak-hak orang lain dalam konteks hubungan masyarakat yang damai dan terbuka. Pemahaman ini merupakan bagian dari konsep humanisme Islam, yang direpresentasikan dalam praktik amal saleh. Prinsip ini dapat membantu umat Islam memahami modernitas dengan dasar ajaran agama yang sah, sehingga dapat mengapresiasi perubahan zaman secara otentik.¹¹

Selanjutnya, berkaitan dengan Pancasila, Cak Nur menjelaskan bahwa penting untuk menyadari bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara sila-sila dalam Pancasila, yang berperan sebagai pengikat untuk mempertahankan kesatuan nilai-nilai humanismenya. Dengan adanya keterkaitan ini, masyarakat dapat berupaya untuk menggali pemahaman yang lebih menyeluruh tentang makna yang ada dalam sila-sila tersebut.¹² Nilai-nilai tersebut berpijak pada prinsip teologis Nurcholish Madjid meyakini sebagai pengaktualisasikannya kedalam semangat kemanusiaan, yakni prinsip ketuhanan (keimanan), persamaan harkat dan martabat manusia, dan prinsip kebebasan atau manusia yang egaliter, terbuka dan adil secara sosial.¹³

Bagi Nurcholis Madjid, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip yang konsisten secara mutlak menjadi dasar dari segala permasalahan yang berkaitan dengan Pancasila. Telah dijelaskan dengan tegas bahwa bersama dengan banyak individu di Indonesia, sepakat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila utama dan pondasi dari Pancasila.¹⁴ Apabila keyakinan terhadap Tuhan Yang

¹¹ Budhy Munawar, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019), hal. 4140

¹² Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: Paramadina, 1997), hal. 239

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemoderanan*, cet. 3, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. xxi

¹⁴ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemoderanan, dan Keindonesiaan*, edisi 2 (Bandung: Mizan, 2013), hal. 241

Maha Esa, benar-benar menghasilkan sikap moral yang tinggi yang tercermin dalam nilai Perikemanusiaan yang adil dan bermartabat, dengan pola interaksi sosial yang saling menghormati dan menghargai, maka salah satu hasil dari nilai dan sikap tersebut adalah kesiapan untuk mengakui peran rakyat dalam kehidupan bernegara dan dalam konteks kemanusiaan.

Kemudian pada sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seuruh rakyat Indonesia mengindikasikan pada Sila ini dianggap sebagai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita yang memiliki iman dan taqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), menjaga persatuan nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat melalui mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Dalam konteks ini, keadilan bukan berarti setiap individu harus memiliki kekayaan yang sama, seperti semboyan yang pernah dikenal dari orang-orang PKI "*sama rata sama rasa*". Akan tetapi, keadilan yang dimaksudkan adalah adanya distribusi hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Keberhasilan keadilan ini akan tercapai apabila keempat sila lainnya diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁵

Dalam era globalisasi yang terus berubah, Pancasila juga dapat berperan sebagai perekat sosial yang mempersatukan beragam komunitas di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip harmoni, bisa menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan mengatasi isu-isu ketidakadilan dan kekerasan yang mungkin muncul di tengah beragamnya masyarakat Indonesia. Dengan mendalami dan mengaktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila, setiap warga negara diharapkan dapat aktif terlibat dalam membangun masyarakat yang semakin luas dan inklusif, menolak tindakan kekerasan, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai yang mendukung penyelenggaraan berbagai

¹⁵ Budhy Munawar, dkk, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 245-246

aspek kehidupan di Indonesia dan menjadi fondasi moral yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan bentuk gagasan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila melalui analisis terhadap pemikiran filosofis Nurcholis Madjid tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ia gagas berdasarkan tinjauan terhadap aspek spiritual dan antropologis manusia guna merespon problem sosial masyarakat Indonesia. Melalui metode analisis-dekriptif, tulisan ini disusun dengan mengacu kepada karya-karya utama Nurcholis Madjid.

B. Identifikasi Masalah

1. Kehidupan manusia di era globalisasi mengalami pergeseran nilai dan norma yang menyebabkan munculnya perilaku yang cenderung mengabaikan norma dan etika bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yaitu Pancasila. Adapun krisis humanisme adalah suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya secara layak hak sebagai seorang manusia, penyebab dari krisis humanisme sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal akibat dari paham yang tidak sejalan antara satu dengan yang lain.
2. Sebagian masyarakat menganggap pembahasan mengenai nilai kemanusiaan sebagai hal biasa dan tidak benar-benar memahami esensi nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan terjadinya fenomena masalah sosial, seperti perundungan, korupsi, dan ketidakadilan sosial.

Berangkat dari masalah tersebut, peneliti berusaha mengkaji pemikiran Nurcholis Madjid untuk mengatasi berbagai persoalan dan konflik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang di atas, peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas agar pembahasannya tidak akan meluas dari pembahasan. Peneliti akan

memfokuskan penelitian ini pada Nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila dalam pandangan Nurcholis Madjid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perlu adanya rumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan primer: bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila perspektif Nurcholis Madjid?

Adapun dari pertanyaan primer tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sekunder sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan?
2. Bagaimana dasar nilai-nilai kemanusiaan Islam?
3. Bagaimana dasar etika pancasila?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah di atas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan makna nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan Nurcholish Madjid
2. Untuk menganalisis dasar nilai-nilai kemanusiaan Islam dalam pandangan Nurcholish Madjid
3. Untuk menemukan dasar etika pancasila dalam pandangan Nurcholish Madjid

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, ialah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila khususnya dalam pandangan Nurcholis Madjid yang memiliki sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya di bidang

Filsafat Islam dengan harapan dapat dinikmati oleh pembaca dari seluruh kalangan masyarakat luas.

G. Kajian Pustaka

1. Skripsi karya Anwar Sodik dengan judul “*Tauhid dan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pandangan Nurcholis Madjid*”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pandangan Nurcholis Madjid mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada Tauhid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi konsep tauhid yang digagas oleh Nurcholish Madjid yang populer disapa Cak Nur inisarat sekali dengan nilai-nilai humanisme. Seperti, keharusan bersikap adil, egaliter, toleran, saling menghargai dan tidak memaksakan kebebasan orang lain, bersikap inklusif dan pluralis dalam beragama, bersikap kritis dan bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan tidak fanatik ataupun sektarianisme. Bagi Cak Nur, semua nilai-nilai humanis tersebut merupakan konsekuensi logis dari paham ketauhidan. Yaitu persaksian dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat landasan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam penelitian saya berlandaskan pada keislaman dan Pancasila.
2. Skripsi karya Aan Solehah dengan judul “*Genealogi Humanisme Nurcholis Madjid*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek lain dari pemikiran Nurcholis Madjid, yaitu pemikiran keagamaan yang berkenan dengan manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asal usul pemikiran humanisme Nurcholis Madjid berdasarkan pedoman terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai musyawarah dan menegakkan keadilan. Dengan musyawarah antara sesama warga masyarakat merupakan hakikat kaum beriman. Sedangkan

¹⁶ Anwar Sodik, *Tauhid dan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada pembahasan yang dinalisis. Dalam penelitian tersebut, menganalisa fondasi dari humanisme Nurcholis Madjid, sedangkan dalam penelitian saya juga ditelaah nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila sehingga bisa relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini.

3. Jurnal karya Musthofa dengan judul “*Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perspektif humanisme-Pancasila dalam pemikiran pendidikan Islam. Sila kedua dalam Pancasila, yang berbicara tentang kemanusiaan, merupakan inti dari ajaran humanisme ini. Masyarakat Indonesia telah mengadopsi Pancasila sebagai fondasi dan pandangan hidup yang mendasari berbagai aspek kehidupan. Dasar vertikal pada Tuhan (Allah) diharapkan mampu membangkitkan semangat dan membantu dalam mencapai tujuan hidup guna menjaga nilai-nilai esensial, martabat manusia, dan harkat hidup. Humanisme Islam, karena menempatkan etika dan kebaikan sebagai prioritas untuk semua (*rahmah li-al-'alamīn*), juga memiliki relevansi penting. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berakar pada humanisme-Pancasila memiliki ciri-ciri berikut: (1) menghormati kepercayaan religius, (2) menghormati martabat dan hak asasi manusia, (3) memiliki pandangan nasionalisme, (4) menghargai kebebasan secara demokratis, (5) menegakkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ini. Nilai-nilai Pancasila harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan ini menjadi dasar dalam pendidikan untuk membentuk individu Indonesia yang memiliki identitas Pancasila.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terkait fondasi humanisme

¹⁷ Aan Solehah, *Genealogi Humanisme Nurcholis Madjid*, (Skrpsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

¹⁸ Musthofa, “Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila”, *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 24, No. 1, 2017

yang dibahas. Dalam penelitian tersebut merujuk pada teori pendidikan, sedangkan dalam penelitian saya membahas nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila berlandaskan pada humanisme islam Nurcholis Madjid..

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, peneliti melihat mayoritas berfokus pada konsep humanisme islam secara umum tanpa mengkaji lebih dalam fondasi filsafat dari humanisme itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila dalam pandangan Nurcholis Madjid.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, sebuah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dan informasi mengenai tema bahasan dan literatur-literatur pustaka.¹⁹ Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pemahaman dan interpretasi fenomena dengan mendalam dan dalam konteksnya. Ini menggunakan data non-angka seperti wawancara dan observasi untuk menggali makna dan persepsi individu atau kelompok serta mempertimbangkan pengaruh konteks sosial dan budaya. Metode kualitatif umumnya digunakan di bidang ilmu sosial dan humaniora di mana data kuantitatif tidak dapat memberikan pemahaman yang memadai. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek psikologis dan sosial yang kompleks dan beragam dalam kehidupan manusia.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari karya Nurcholis Madjid dan data primer dari

¹⁹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hal. 109

karya Nurcholis Madjid seperti; *Islam Agama Kemanusiaan, Doktrin Islam dan Peradaban, Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal* serta dari buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi pendukung lainnya yang memgulas tema ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Teknik yang digunakan ialah pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan objek pembahasan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah menghimpun ragam pemikiran mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan pancasila²⁰. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan pencarian literatur-literatur lainya yang memiliki hubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Setalah melakukan proses pengumpulan data, proses selanjutnya adalah menganalisa dan menggambarkan temuan-temuan penelitian. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis*. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis holistika, yang memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendalam serta mencapai kebenaran yang lebih dalam. Bahkan, identitas objek akan terungkap ketika terjadi komunikasi dan korelasi dengan lingkungan sekitarnya.²¹ Namun, pemahaman terhadap objek hanya dapat tercapai melalui pengamatan terhadap seluruh realitasnya dalam kaitannya dengan manusia, dan manusia itu sendiri dalam konteksnya yang berhubungan dengan segala hal yang melibatkan hubungan aksi-reaksi yang sesuai dengan tema yang relevan pada masa tersebut. Pandangan dengan

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010) hal. 30

²¹ Kartini Kartono, *Metodologi Research* (Bandung: Mandar Maju, 1990) 28.

kesinambungan dalam satu totalitas.²² Pendekatan dan metode ini dimaksudkan menyelami pemikiran dari Nurcholis Madjid, sebagaimana pemikiran yang dijadikan batasan-batasan yang terkait konsep humanism yang dilontarkan serta solusi yang ditawarkan dengan menganalisisnya secara mendalam.

I. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penelitian ini, peneliti merangkai sistematika penulisan dengan beberapa susunan, diantaranya:

1. Bab I, yang berisi tentang pendahuluan (peneliti menuliskan latar belakang), Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti membahas alasan yang menjadi pembahasan dalam pengambilan tema penelitian.
2. Bab II, yang berisi tentang diskursus umum mengenai humanisme dan pancasila. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan ragam pandangan antara keduanya sehingga bisa menjadi bahan analisis di bab-bab selanjutnya.
3. Bab III, yang berisi tentang ulasan fondasi pemikiran dari tokoh Nurcholis Madjid, diuraikan mulai dari biografi, latar belakang keilmuan, serta pemikiran filsafatnya. Selain itu, dibahas juga nilai kemanusiaan dalam pancasila dalam pandangannya.
4. Bab IV, yang berisi tentang ulasan deskripsi dan analisis terhadap Nilai-nilai kemanusiaan dalam pancasila dalam pandangan Nurcholis Madjid. Pada bab ini akan diselaraskan berbagai nilai-nilai pancasila dengan humanisme islam perspektif Nurcholis Madjid sebagai benang merah sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian.

45. ²² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997),

5. Bab V: Pada bab ini, penulis fokus kepada hasil kesimpulan seluruhnya secara ringkas, dan saran masukan guna melengkapi penelitian sebelum serta sesudahnya.

BAB II

KAJIAN DASAR MENGENAI HUMANISME DAN PANCASILA

A. Humanisme

Sebagai paham yang telah memengaruhi pemikiran dan budaya manusia selama berabad-abad, humanisme memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah intelektual dan sosial. Dalam sub bab ini, akan dikaji humanisme yang mencakup definisi, sejarah perkembangan, dan dasar-dasarnya. Humanisme lebih dari sekadar pandangan filosofis, namun juga merupakan ideologi yang mengangkat martabat dan potensi manusia sebagai inti dari eksistensi. Berikut akan diuraikan pemahaman mendalam tentang humanisme dan bagaimana pandangan ini telah membentuk pemikiran dan tindakan manusia sepanjang masa.

1. Definisi Humanisme

Istilah humanisme berasal dari bahasa Latin, dengan kata "*humanus*" yang merujuk pada sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia, dan mempunyai akar kata "*homo*" yang berarti manusia.²³ Menurut kamus Oxford, humanisme adalah suatu sistem pemikiran yang menganggap bahwa pemecahan masalah manusia dengan menggunakan akal lebih penting daripada kepercayaan agama. Humanisme menekankan bahwa sifat dasar manusia adalah baik, dan kata sifat "humanistik" merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran atau ideal humanistik. Seorang "humanis" adalah seseorang yang meyakini prinsip-prinsip humanisme. Dengan kata lain, humanisme mengutamakan pemikiran rasional dalam menyelesaikan masalah

²³ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 93

manusia daripada keyakinan agama, serta menekankan pandangan bahwa sifat dasar manusia adalah baik.²⁴

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), humanisme adalah aliran yang bertujuan untuk membangkitkan rasa perikemanusiaan dan mendorong terciptanya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis, di sisi lain, merujuk kepada individu yang memiliki aspirasi dan berjuang untuk menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik, dengan berlandaskan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan pelayanan kepada kepentingan sesama umat manusia.²⁵

Adapun dalam kamus filsafat, humanisme mengacu pada pemahaman mendalam terhadap eksistensi manusia. Terdapat tiga aspek utama yang merangkum definisi manusia dalam konteks humanisme. Pertama, humanisme menganggap individu yang memiliki kemampuan rasional sebagai nilai paling tinggi, menekankan pentingnya pikiran dan akal budi manusia dalam pemahaman dan tindakan. Kedua, humanisme melihat individu sebagai sumber nilai tertinggi dalam masyarakat, menekankan otonomi individu dan martabatnya dalam mengambil keputusan serta mencapai potensi penuhnya. Ketiga, humanisme berfokus pada upaya pemupukan perkembangan kreativitas dan moral individu secara rasional, tanpa harus mengacu pada konsep-konsep yang bersifat adikodrati atau dogmatis. Dengan demikian, humanisme dalam filsafat menempatkan manusia dan potensinya sebagai pusat perhatian, dengan penekanan pada akal budi, otonomi, dan perkembangan individu.²⁶

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan secara bahasa, humanisme merupakan pandangan yang menekankan pemahaman manusia melalui akal budi dan mempercayai bahwa bawaan manusia adalah baik. Dalam konteks sosial, humanisme

²⁴ Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2010), cet. VII, hal. 733.

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/humanis>

²⁶ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. IV, hal. 295.

mendorong rasa kasih sayang dan mencita-citakan perbaikan dalam kehidupan, dengan "humanis" mengacu pada individu yang bekerja menuju hal ini dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam filsafat, humanisme mengutamakan individu yang memiliki kemampuan berpikir rasional, menghargai martabat individu dalam masyarakat, serta mendorong pertumbuhan kreativitas dan moral individu melalui pendekatan yang logis. Humanisme menekankan pentingnya manusia dan potensinya dengan fokus pada akal budi, otonomi, dan perkembangan individu.

Muthahhari mendefinisikan humanisme sebagai pandangan yang mengutamakan persatuan dan kesetaraan di antara semua individu, tanpa memandang perbedaan-perbedaan sosial, kebangsaan, budaya, atau agama yang mereka anut. Bagi Muthahhari, humanisme berarti menolak segala bentuk diskriminasi sehingga semua manusia dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak yang sama untuk dihormati. Dalam visinya, humanisme menekankan bahwa martabat setiap manusia memiliki nilai yang identik dan tidak tergantung pada faktor eksternal yang bisa memisahkan mereka. Sebagai akibatnya, pandangan humanisme yang ditekankan oleh Muthahhari mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta nilai-nilai universal yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka.²⁷

Di sisi lain, Budi Hardiman memandang humanisme sebagai pandangan yang menekankan peran utama individu dalam konsep ini. Menurutnya, humanisme mengedepankan otonomi individu sebagai fondasi yang penting dalam menentukan martabat manusia. Ia meyakini bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Pentingnya pandangan ini adalah bahwa

²⁷ Muthahhari, Murtadha, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi. Islam tentang Jagat Raya*, terj. Ilyas Hasan. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.), hal. 253

nilai manusia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti status sosial, kebangsaan, atau agama, melainkan merupakan nilai yang melekat pada setiap individu.²⁸

Franz Magnis-Suseno menginterpretasikan humanisme sebagai konsep martabat atau posisi yang mencerminkan seluruh aspek individu manusia dan membedakannya dari makhluk lain di dunia ini. Dalam pendekatannya, ia menekankan bahwa martabat manusia adalah tentang nilai yang melekat dalam diri setiap individu, yang menjadikan manusia sebagai entitas yang unik dan memiliki nilai yang tak ternilai.²⁹ Dengan kata lain, pandangan humanisme yang dianut oleh Franz Magnis-Suseno menyoroti fokus pada nilai intrinsik yang membawa keunikan dan keberhargaan pada setiap individu manusia, yang membedakannya dari entitas lain di alam semesta

Kesimpulannya, pandangan para tokoh ini memperkaya pemahaman tentang humanisme yang merupakan paham yang mengutamakan persatuan, penolakan terhadap diskriminasi, dan mengangkat martabat manusia sebagai satu kesatuan yang tidak tergantung pada perbedaan kelas sosial, kebangsaan, budaya, atau agama, serta menekankan otonomi individu dan nilai intrinsik manusia yang membuatnya unik dan berharga.

2. Sejarah dan Perkembangan

Humanisme secara sejarah mengacu pada suatu pergerakan intelektual dan sastra yang pertama kali muncul di Italia pada abad ke-14 Masehi. Gerakan ini dapat dianggap sebagai pendorong utama bagi perkembangan budaya modern, terutama budaya Eropa.³⁰ Gerakan ini lahir selama periode Renaissance, yang terinspirasi oleh kebudayaan Yunani klasik. Kemudian, proses modernisasi mulai merambah ke berbagai aspek

²⁸ F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 7

²⁹ Frans Magnis-Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia, 1991), Hal. 95

³⁰ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 25.

kehidupan, termasuk dalam bidang intelektual. Hal ini menghasilkan zaman pencerahan intelektual dengan moto "beranilah memakai nalarmu" (*sapere aude*). Zaman ini menuntut agar manusia berani berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti keyakinan yang tidak rasional, dan masa ini sangat dipengaruhi oleh aliran empirisme dan rasionalisme.³¹

Pada zaman Yunani kuno, humanisme menandai awal dari pergeseran paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat, yang terjadi setelah pergeseran dari pandangan yang menitikberatkan pada kosmos, atau perubahan dari pandangan kosmosentris ke antroposentris. Pemikiran humanis dalam filsafat Yunani yang memfokuskan penelitian pada manusia sebagai objek dimulai oleh Socrates³² dan kelompok Sofis.³³

Berbeda dengan era Yunani, zaman pertengahan menggambarkan suatu paradigma yang berbeda dalam konteks humanisme. Pada masa ini, humanisme lebih cenderung bersifat teosentris. Alam semesta dipandang sebagai penciptaan Tuhan, di mana segala hal mendapatkan maknanya melalui hubungannya dengan Tuhan yang merupakan pusat paradigma ini melalui wahyu. Zaman Abad Pertengahan ini mencerminkan karakteristik utama dari humanisme teosentris.

³¹ Zaki Hidayatulloh, *Islam dan Humanisme Menurut Sayyid Hossein Naser*, (Respository IAIN Sumut, 2012), hal. 46

³² Filosof ini lahir di Antena tahun 470 Sebelum Masehi dan wafat pada tahun 399 Sebelum Masehi. ayahnya seorang pembuat patung dan ibunya seorang bidan. Pada mulanya Socrates ingin mengikuti jejak ayahnya, jadi pemahat patung. namun, didalam perjalanannya dia berganti haluan. Dari membentuk batu menjadi patung, dia membentuk watak manusia lewat pemikirannya. Lihat. Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Ui Press, 2006), hal. 73

³³ Kaum Sofis adalah aliran filsafat baru di Yunani yang lahir sekitar dipertengahan Abad Ke 5 Sebelum Masehi. Berasal dari kata Sophos yang berarti cerdas pandai. Gelar Sofis pada awalnya diberikan kepada ahli bahasa, ahli filsafat, ahli politik dan lain sebagainya. Namun, lama kelamaan kata tersebut berubah arti. Sofis menjadi gelar bagi orang yang pandai memutar balikkan lidah, pandai bermain dan bersilat dengan kata-kata. Sofis, berubah nama pujian menjadi nama ejekan dan hinaan. mereka terkenal dengan pandangan relativisme subjektif. tidak memiliki objektifitas kebenaran, Lihat. Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, hal. 53.

Humanisme merupakan salah satu ciri khas dari periode Renaissance Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, yang merupakan fenomena global dalam sejarah. Sebagai embrio dari zaman modern, ini adalah tanggapan terhadap Abad Pertengahan di mana pemikiran manusia terkekang oleh pengaruh gereja (keagamaan atau Tuhan).³⁴ Periode Renaissance juga sering disebut sebagai periode humanisme.³⁵ Humanisme muncul sebagai bagian dari gerakan Renaissance yang berlangsung di Eropa, dengan tujuan menghidupkan kembali kemajuan dalam bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan pemikiran yang pernah ada pada zaman klasik, sambil menentang kendali gereja.

Humanisme muncul selama periode Renaissance, dan dalam konteks Renaissance, itu membebaskan manusia dari keterbatasannya. Ini menunjukkan bahwa akal manusia memiliki potensi untuk mengatur alam dan menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bukti yang mencirikan kemunculan humanisme selama periode Renaissance adalah perkembangan seni dan sastra, serta penelitian empiris yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan. Jules Michelet, seorang sejarawan Perancis, pertama kali menyatakan bahwa Renaissance adalah periode di mana penemuan tentang manusia dan dunia terjadi, lebih dari sekadar kebangkitan peradaban awal dalam perkembangan dunia modern.³⁶

Meskipun humanisme Renaissance menciptakan sejumlah paradoks dalam eksistensi manusia, setelah berakhirnya periode Renaissance, humanisme tidak lagi menjadi gerakan budaya, melainkan telah menjadi bagian dari cara hidup umum manusia modern di seluruh dunia.³⁷

³⁴ Sokhi Huda, *Humanism Islam: Potret Romantic Dan Responya Terhadap Modernism*, hal. 1.

³⁵ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Hingga James*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal.115.

³⁶ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Hingga James*, hal. 110

³⁷ Titis Rosowulan, *Aspek-Aspek Humanis Pemikiran Keagamaan Hamka*, hal. 17

Modernisme berkembang kuat berkat kontribusi Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern, dalam mewujudkan rasionalisme. Slogan terkenalnya, "cogito ergo sum," mengandung makna bahwa "aku berpikir, maka aku ada." Di bawah pengaruh Hobbes, rasionalisme berkembang menjadi arah "ateisme" dan "materialisme." Sementara dalam pandangan Cartesius, rasionalisme memiliki sifat "dualistik," dengan puncaknya yaitu keyakinan bahwa realitas dunia ini mirip dengan sebuah mesin raksasa yang tidak memiliki unsur spiritual, seperti Tuhan.³⁸

Bahkan dalam bentuk yang lebih radikal, rasionalisme berada di bawah kendali Nietzsche, yang menggambarkan "ateisme nihilisme" melalui bahasanya yang provokatif dalam bukunya. Nietzsche menyatakan, "Ke mana Tuhan lainnya? Aku akan menjelaskannya kepada kalian. Kita telah membunuh-Nya. Kita semua adalah pembunuh... Sudahkah kita menyadari para penggali kubur yang tengah mengubur Tuhan? Tuhan telah mati, dan Dia tetap mati."³⁹

Pada saat ini, gaya modern yang berlandaskan pada pemikiran rasional, dunia sekuler, dan fokus pada manusia sangat dihargai, sehingga otoritas agama dan pandangan yang melibatkan hal-hal transenden semakin terpinggirkan. Secara praktis, suasana ini dianggap sebagai penggeseran keyakinan yang menggantikan peran agama. Sementara dalam konteks teoritis, tren ini tercermin dalam berbagai aliran filsafat yang condong menuju aliran Ateisme.⁴⁰

3. Dasar-Dasar Humanisme

Filsafat dan esensi dari humanisme, yang menjadi prinsip utama dalam setiap aliran pemikiran humanisme, adalah

³⁸ Syamsul Arifin, *Spiritualitas Islam Dan Peradaban Masa Depan*, (Yogyakarta: Sypress, 1996), hal. 25.

³⁹ Ahmad Syafii Ma'arif, *Al-Qur'an, Relitas Social Dan Limbo Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hal. 39.

⁴⁰ Titis Rosowulan, *Aspek-Aspek Humanis Pemikiran Keagamaan Hamka*, hal. 17

menempatkan manusia sebagai tolok ukur segala hal. Menurut Mahmoud Rajabi, setidaknya ada empat landasan yang mendasari humanisme:

a. Empirisme dan Rasionalisme

Dalam humanisme, rasionalisme dan empirisme adalah dua prinsip mendasar yang menginspirasi pandangan mereka tentang bagaimana manusia memahami dirinya dan dunia sekitarnya. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas, makna sejati kebahagiaan, dan metode untuk mencapainya melalui pemikiran yang logis. Sedangkan secara empiris, humanis meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia tidak memiliki substansi yang nyata. Oleh karena itu, dalam hal nilai dan hak, mereka lebih cenderung berpendapat bahwa penentuan ini harus didasarkan pada penilaian rasional manusia. Namun, dalam konteks filsafat, empiris cenderung meragukan klaim-klaim yang tidak dapat diuji secara empiris, seperti keberadaan Tuhan, wahyu, hari kiamat, dan mukjizat dalam agama, karena klaim tersebut dianggap sebagai konsep yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Walaupun demikian, Rasionalisme dan empirisme juga menggali wilayah nilai-nilai agama dan etika. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu, termasuk prinsip-prinsip dasar etika, adalah hasil dari penciptaan manusia. Seperti yang dikutip oleh Mahmoud Rajabi, Walter Lippman menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan panduan etika dalam perjalanan hidup mereka. Mereka harus menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa tidaklah cukup untuk keinginan manusia sejalan atau sesuai dengan kehendak Tuhan; sebaliknya, keinginan manusia harus selaras dan sesuai dengan

pengetahuan terbaik mereka tentang apa yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan manusia.⁴¹

b. Liberalisme

Humanis liberal meyakini bahwa manusia secara inheren memiliki hak untuk kebebasan dan seharusnya tidak terikat oleh sesuatu kecuali yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Namun, paradoksnya adalah bahwa lembaga-lembaga utama pada zaman pertengahan telah memaksa manusia menjadi tawanan dan mengharuskan mereka untuk tunduk pada hukum-hukum agama dalam konteks moral yang dianggap sebagai kumpulan nilai-nilai yang berasal dari Realitas Ultim. Para humanis berpendapat bahwa nilai-nilai ini, yang dianggap sebagai nilai-nilai ketuhanan yang harus dijaga, seharusnya ditolak dengan tegas dan tidak dapat diterima. Mereka melihat hal ini sebagai tradisi yang harus diubah karena sangat bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan dan kemerdekaan manusia.

c. Toleransi Beragama

Setelah konflik agama yang terjadi pada abad ke-16 dan ke-17, muncul isu tentang kemungkinan kehidupan damai antara individu beragama yang berbeda, dengan penekanan pada pentingnya toleransi beragama. Semangat toleransi beragama ini mempengaruhi pandangan agama-agama tradisional yang lebih cenderung ke arah humanisme. Dalam pandangan ini, toleransi beragama berarti bahwa setiap agama, sambil tetap mempertahankan identitasnya yang unik, dapat hidup berdampingan dengan damai. Di sisi lain, pandangan toleransi beragama dalam perspektif humanis kontemporer berasal dari keyakinan bahwa ajaran-ajaran agama berasal dari batin manusia sendiri, bukan dari realitas eksternal di luar dirinya.

Inti dari ajaran-ajaran tersebut adalah prinsip persatuan antara iman yang melampaui batas dan kemungkinan adanya

⁴¹ Mahmoud Rajabi, *Insan Syenasi*, Terj. Yusuf Anas, *Horison Manusia*, (Jakarta: Perbit al Huda, 2006), hal. 35

perdamaian universal. Para humanis menginterpretasikan dunia ini dan menganggap Tuhan dalam ajaran Kristen sebagai konsep rasional yang telah menjadi aliran pemikiran yang lebih simpel. Dalam perspektif ini, selain menciptakan toleransi antaragama, toleransi dan koeksistensi damai antara filsafat dan agama, yang sebelumnya seringkali saling bertentangan, juga dapat terwujud. Ini menjadi kenyataan terutama jika kita melihat kembali ke zaman Yunani Kuno dan pandangan rasionalisme. Pandangan ini berdasarkan penolakan terhadap klaim eksklusif atas kebenaran dan keselamatan yang diajukan oleh berbagai sistem nilai dan agama, dan menggantikannya dengan keyakinan pada relativitas mutlak nilai-nilai dan pengetahuan agama. Oleh karena itu, keputusan mengenai kekuasaan setiap agama dan sistem nilai harus diberikan sepenuhnya kepada kehendak dan keinginan individu serta masyarakat.⁴²

d. Sekularisme

Secara esensial, sekularisasi berasal dari kata "sekuler" yang berasal dari bahasa Latin "Seaculum," yang berarti "abad" atau "abad kehidupan." Ini merujuk pada konsep yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dunia atau terkait dengan kehidupan di dunia ini. Dalam bahasa Inggris, kata "secular" menggambarkan sesuatu yang terkait dengan dunia nyata, sementara, tidak bersifat spiritual, tidak abadi, dan tidak sakral, serta berhubungan dengan kehidupan di luar konteks biara.⁴³ Orang-orang yang bersifat sekuler meyakini bahwa humanisme adalah serangkaian prinsip filosofis, moral, dan budaya yang telah berkembang secara berkesinambungan sejak zaman Yunani kuno. Sumber dari jenis humanisme ini dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno, yang

⁴² Mahmoud Rajabi, *Insan Syenasi*, Terj. Yusuf Anas, *Horison Manusia*, hal.

⁴³ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), hal. 188. Lihat juga Harun Nasotion, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran*, (Cet. V; Bandung: Mizan, 1998), hal. 188

memandang bahwa manusia selalu berada dalam konflik dengan dewa-dewa. Dewa-dewa ini dianggap sebagai kekuatan yang menentang manusia, berusaha mengendalikan mereka dengan kekuasaan tirani, dan menghambat kebebasan serta kemerdekaan manusia.⁴⁴

Kelompok humanis sekuler mencetuskan sepuluh perhatian utama mereka sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Berkomitmen untuk mendukung penyelidikan yang bebas dan menentang segala bentuk penindasan terhadap pemikiran manusia.
- 2) Mempercayai pemisahan yang jelas antara lembaga gereja dan pemerintahan negara.
- 3) Kebebasan dalam pemikiran, keyakinan, serta dari tekanan gereja, politik, dan ekonomi yang berusaha membatasinya, termasuk kebebasan politik yang murni.
- 4) Pertimbangan etika harus berdiri secara independen dari ajaran agama dan harus menjadi domain penelitian yang bebas.
- 5) Pendidikan moral harus diajarkan kepada anak-anak dan pemuda, tetapi tanpa adanya pengaruh doktrinasi sampai mereka cukup matang untuk memilih sendiri.
- 6) Cenderung bersikap skeptis terhadap klaim-klaim supernatural.
- 7) Mempercayai sepenuhnya penggunaan metode penelitian rasional, penggunaan logika, dan bukti dalam menguji kebenaran.
- 8) Meyakini bahwa metode ilmiah, meskipun tidak sempurna, adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk memahami dunia.
- 9) Prihatin oleh serangan dari kelompok fundamentalis agama terhadap teori evolusi.
- 10) Pendidikan sebagai sarana esensial untuk membentuk masyarakat yang manusiawi, bebas, dan demokratis.

⁴⁴ Hadimulyo, *Manusia Dalam Perspektif Humanisme Agama Pandangan Ali Shariati*, dalam *Insan Kamil*, (Jakarta : PT PustakaGrafiti Press, 1987), hal. 169

⁴⁵ Bambang Sugiharto, *Humansime dan Humaniora*, (Bandung: Matahari, 2013), hal. 217

B. Pancasila

Pancasila memiliki makna yang luas ketika dianalisis secara ilmiah terkait dengan perannya dan kedudukannya. Ini mencakup perannya sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, Ideologi Bangsa dan Negara, serta identitas nasional, serta perkembangannya. Oleh karena itu, berbagai terminologi digunakan untuk menggambarkan Pancasila secara obyektif sesuai dengan perannya dan fungsinya. Dalam konteks pemahaman Pancasila, berbagai penekanan akan muncul yang sesuai dengan peran dan fungsinya, terutama dalam perjalanan sejarahnya, mulai dari nilai-nilai dalam pandangan hidup bangsa hingga menjadi Dasar Negara, bahkan dalam pelaksanaannya dalam sejarah negara Indonesia di masa lalu. Misalnya, selama pemerintahan Orde Lama, berbagai rumusan Pancasila yang berbeda-beda muncul. Agar bisa memahaminya dengan baik, perlu mendeskripsikannya secara obyektif sesuai dengan posisi dan perumusan Pancasila itu sendiri.

1. Definisi Pancasila

Secara etimologis, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta, yang merupakan bahasa dari kasta Brahmana di India. Ini dapat diuraikan menjadi dua kata, yaitu "Panca" yang berarti lima, dan "Sila" yang berarti dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar, yang merujuk kepada lima Prinsip Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, kata "sila" juga dapat merujuk pada aturan atau prinsip yang mengatur perilaku individu atau bangsa, yang mencakup norma-norma sopan santun, etika, dan moral. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-14, tercatat dalam buku "*Negarakertagama*" yang ditulis oleh Empu Prapanca, serta dalam buku "*Sutasoma*" karya Empu Tantular.⁴⁶

⁴⁶ Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin, Antasari Press,), hal. 8

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu : “ *panca*” yang artinya “lima “ dan “*syila*” dengan vokal (i) pendek yang artinya “batu sendi”, atau “alas”, atau “dasar, dan “*syila*” dengan vokal (i) panjang, yang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.⁴⁷ Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara etimologi kata “Pancasila’ yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal (i) pendek yang memiliki makna “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “*Panca Syiila*” dengan huruf (i) panjang, berarti lima aturan tingkah laku yang penting.⁴⁸

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: *Suttha Pitaka*, *Abhidama Pitaka*, dan *Vinaya Pitaka*. Dalam ajaran budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Adapun ajaran-ajaran moral tersebut adalah: Dasasyila, Saptasyila, dan Pancasyila.

Ajaran Pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral prenciples* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam, yang larangan tersebut meliputi: *Pertama*, “*Panatipada veramani sikhapadam samadiyani*”, maksudnya “jangan mencabut nyawa atau membunuh”. *Kedua*, *Dinna dana veramani shikapadam samadiyani*, maksudnya “jangan mengambil barang yang bukan haknya atau mencuri”. *Ketiga*, *Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani*, maksudnya: “janganlah berbuat zina”. *Keempat*, *Musawada veramani sikhapadam samadiyani*, artinya “janganlah berdusta”. *Kelima*, *Sura meraya masija pamada*

⁴⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hal. 21

⁴⁸ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Indonesia Vol. II dan III*, (Jakarta: Siguntang, 1971), hal. 437

tikana veramani, yang maksudnya: “*Janganlah meminum minuman keras yang dapat memabukkan*”.⁴⁹

Berikutnya dengan masuknya kebudayaan India dan menyebarnya agama Hindu dan Budha ke wilayah Nusantara, maka secara tidak langsung ajaran Pancasila Budhismepun juga masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada Jaman Majapahit. Oleh sebab itu di zaman kerajaan Majapahit di bawah raja Hayam Wurk dan Maha Patih Gajah Mada, terdapat keropak Negarakertagama (syair pujian) dalam pujangga istana yang bernama Empu Prapanca (selesai 1365), yang berbunyi “*Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka kerama*”, yang maksudnya: “*Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila)*”, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.⁵⁰

Seiring dengan runtuhnya kerajaan Maja Pahit dan agama Islam mulai berkembang di kerajaan Maja Pahit, namun sisa-sisa ajaran moral Budha (Pancasila) terutama tentang berbagai larangan masih tetap dikenal di masyarakat. Ajaran tersebut dikenal dengan 5 M atau lima Ma. Yaitu larangan untuk mateni atau membunuh, larangan untuk maling atau mencuri, larangan Madon atau main perempuan/berzina, larangan mabok atau meminum minuman keras, dan larangan main atau berjudi.⁵¹

Meskipun definisi "Pancasila" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 atau dalam bagian Tubuh UUD 1945 itu sendiri, namun dapat dengan cukup jelas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Pancasila" adalah lima prinsip dasar Negara kita yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Ke-Tuhanan Yang Mahas Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁴⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1955), hal. 361

⁵⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, hal. 22

⁵¹ Ismaun, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: C.V. Carya Remaja, 1981), hal. 79

- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2. Etika Pancasila

Etika Pancasila merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian dijabarkan melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, merupakan nilai-nilai yang digali dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sejak ribuan ratusan tahun yang lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri.⁵² Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya;⁵³

Pertama, Nilai Ketuhanan: Dalam hierarki nilai, nilai ini dapat dianggap sebagai yang paling tinggi karena berkaitan dengan nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan berasal dari nilai ini (nilai ketuhanan). Suatu tindakan dianggap baik jika tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum Tuhan. Dengan pendekatan empiris, dapat dibuktikan bahwa setiap tindakan yang melanggar nilai, norma, dan hukum Tuhan, terutama dalam konteks hubungan kasih sayang antar sesama, cenderung memicu konflik dan permusuhan. Dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, terbentuklah nilai-nilai seperti spiritualitas, ketaatan, dan toleransi.

Kedua, Nilai Kemanusiaan: Sebuah tindakan dianggap baik jika sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip utama dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan memerlukan keselarasan antara aspek fisik dan mental,

⁵² Rahmah Ningsih, *Pancasila Sebagai Sistem Etika*, E. Learning, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019), hal.

⁵³ Ngadino Surip, dkk, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 180-183

tubuh dan jiwa, individu dan masyarakat, serta makhluk manusia yang memiliki kebebasan dan makhluk Tuhan yang tunduk pada hukum Tuhan. Keadaban menunjukkan superioritas manusia dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda mati. Oleh karena itu, suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada konsep keadilan dan keadaban. Dari nilai kemanusiaan ini, muncul nilai-nilai seperti kesopanan, rasa hormat, kerja sama, dan sebagainya.

Ketiga, Nilai Persatuan: Sebuah tindakan dianggap baik jika dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan dorongan untuk selalu menang sendiri dianggap sebagai tindakan yang tidak baik, begitu pula tindakan yang merusak persatuan. Meskipun seseorang mungkin mengklaim bahwa tindakannya didasarkan pada agama (sebagai contoh, sila ke-1), jika tindakan tersebut dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang baik. Dari nilai persatuan ini, timbul nilai-nilai seperti cinta tanah air, pengorbanan, dan lain sebagainya.

Keempat, Nilai Kerakyatan: Dalam konteks kerakyatan, terdapat nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan serta prinsip permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan mengacu pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan yang tertinggi. Dalam konteks mencari kebaikan, pandangan dari kelompok minoritas tidak selalu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Sebagai contoh, dalam peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, sebagian besar anggota PPKI mendukung penghapusan tersebut, namun dengan memperhatikan pandangan kelompok minoritas (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis dapat diterima, pandangan minoritas "mengalahkan" pandangan mayoritas berdasarkan musyawarah. Dengan demikian, tindakan tidak selalu baik hanya karena disetujui atau bermanfaat bagi banyak orang, tetapi tindakan tersebut dianggap baik jika didasarkan pada musyawarah yang

berlandaskan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Dari nilai kerakyatan ini, muncul nilai-nilai seperti menghargai perbedaan, kesetaraan, dan sebagainya.

Kelima, Nilai Keadilan: Ketika sila kedua menyebutkan kata "adil," makna kata tersebut diterapkan dalam konteks individu manusia. Sementara itu, nilai keadilan dalam sila kelima lebih berfokus pada aspek sosial. Sebuah tindakan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat yang lebih luas. Menurut Kohlberg, keadilan dianggap sebagai nilai utama bagi individu maupun masyarakat. Keadilan melibatkan pandangan bahwa setiap individu adalah mitra yang bebas dan setara dengan orang lain.⁵⁴ Dari nilai ini, berkembang tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kerja sama. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keadilan terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain muncul. Dari nilai keadilan ini juga timbul nilai-nilai seperti kepedulian, kesetaraan ekonomi, kemajuan bersama, dan lain sebagainya.

C. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan adalah suatu penghargaan yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan demi kehidupan yang lebih baik. Nilai –nilai humanisme sendiri ada 3 yaitu:⁵⁵

1. Humanum

Istilah "Humanum" merujuk pada konsep manusia dalam hakikatnya atau perannya di dunia, yakni sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam konteks Islam, hal ini dinyatakan sebagai "Khalifah," yang menempatkan manusia sebagai wakil Tuhan di dunia. Dengan kata lain, manusia diberikan segala perlengkapan baik secara fisik

⁵⁴ Lawrence Kohlberg, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Terj. John de Santo dan Agus Cremers, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 84

⁵⁵ Haryanto Ai-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis & Humanis*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hal. 79-80

maupun spiritual untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Ini memungkinkan manusia untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik.⁵⁶

2. Humanis

Istilah "humanis" mengacu pada adanya hubungan yang baik dan harmonis antara individu satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memerlukan orang lain dalam kehidupannya, hampir setiap tindakan seseorang melibatkan peran orang lain. Bahkan dalam sejarah, diceritakan bahwa Nabi membutuhkan seorang teman atau pendamping, yang kemudian menghasilkan penciptaan hawa.⁵⁷ Hal ini mengarah pada perkembangan sifat-sifat seperti saling pengertian, moral yang baik, kerja sama, serta persatuan dalam perjuangan.

3. Humaniora

Humaniora adalah alat atau sarana dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan humanistas, yaitu pengetahuan tentang warisan budaya bangsa, termasuk di dalamnya budaya asli bangsa itu sendiri.

Sedangkan nilai-nilai humanisme menurut Budi Hardiman terbagi menjadi enam:⁵⁸

1. Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan mengacu pada hak setiap warga negara untuk berpendapat dengan bebas. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang dalam kerangka sistem politik dan demokrasi. Hak kebebasan berpendapat ini diatur dalam Undang-Undang HAM, khususnya Pasal 28 E yang mencakup kebebasan

⁵⁶ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam "Tinjau Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisiplin"* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 38.

⁵⁷ Bahrudin dan Moh Makin, *Pendidikan Humanistik : Konsep, Teori, dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2011), hal. 54-55.

⁵⁸ F.Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya "Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusi"* (Jakarta : Prima Grafika, 2012), hal. 7-36

memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.⁵⁹ Dengan adanya hak kebebasan berpendapat ini, setiap individu diharapkan dapat menghormati hak orang lain, dan dengan hak kebebasan tersebut, setiap warga negara dianggap setara di hadapan hukum.

2. Nilai Kerjasama

Kerjasama adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dalam masyarakat, khususnya kerjasama yang berfokus pada kebaikan bersama. Ruskin berpendapat bahwa setiap individu seharusnya bekerja sama dan kepemilikan bersama lebih penting daripada kepemilikan pribadi.⁶⁰ Ini berarti bahwa nilai kebersamaan harus dikedepankan daripada kepentingan pribadi semata. Dengan berfokus pada kerjasama, segala sesuatu akan menjadi lebih indah dan damai. Terutama karena manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup sebagai anggota masyarakat, mereka harus mampu menjalin hubungan baik satu sama lain.

3. Nilai Rela Berkorban

Rela berkorban dalam konteks ini mengacu pada tindakan pengorbanan seseorang, yang bisa berupa investasi waktu, usaha, atau pemikiran, tanpa mempermasalahkan jenis pengorbanannya, demi kebaikan umum. Rela berarti bahwa individu tersebut telah bersedia dengan tulus hati, tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan dari orang lain, dan tindakan tersebut berasal dari kesediaan pribadi mereka. Berkorban adalah saat seseorang memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain, bahkan jika itu menyebabkan penderitaan bagi diri mereka sendiri.⁶¹

⁵⁹ MPRRI, *Bahan Tayangan Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI,2011), hal. 15

⁶⁰ Bernard Murchland, *Humanisme dan kapitalisme "Kajian Pemikiran Moralitas dan Etika Ekonomi"*, (Yogyakarta : Basabasi, 2019), hal. 9.

⁶¹ Sunarso, *Pelajaran Pedidikan Kewarganegaraan*, (Bogor : Yudistira, 2009), hal. 15

4. Nilai Peduli

Peduli adalah prinsip dasar kemanusiaan dan tindakan proaktif untuk memperhatikan dan merespons situasi di sekitar kita. Peduli adalah ketika seseorang merasa prihatin terhadap orang lain atau sesuatu, seperti saat melihat seorang teman yang sedang mengalami kesulitan atau sakit, dan hal ini memicu perasaan empati yang sama dengan yang dirasakan oleh orang tersebut. Hasrat untuk membantu kemudian tumbuh.⁶² Sikap peduli seperti ini merupakan sikap yang mulia dan dapat dikenal sebagai akhlak terpuji dalam agama Islam.

5. Nilai Saling Menolong

Sifat "tolong-menolong" adalah sebuah karakteristik yang melekat pada bangsa Indonesia, yang selalu cenderung untuk memberikan bantuan kepada sesama. Dalam buku yang berjudul "*Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*," Buhanudin Salam menjelaskan bahwa tolong-menolong adalah kemauan untuk memberikan bantuan, baik dalam bentuk material maupun moral.⁶³ Dengan kata lain, tolong-menolong adalah tindakan membantu seseorang yang menghadapi kesulitan untuk meringankan beban mereka.

6. Nilai Solidaritas

Solidaritas adalah kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bersama dan bekerja sama dengan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nilai solidaritas mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sebagai nilai, solidaritas dapat memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta mendorong kasih sayang dan keramahan di antara sesama.⁶⁴

⁶² Arfan Mu'ammam, *Pendidikan Karakter "Strategi Internalisasi Values dan Kajian Teoris*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 134

⁶³ Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : Renika Cipta, 2000), hal. 78.

⁶⁴ Bambang Suteng, *Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal.13

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam konteks nilai kemanusiaan, kesadaran tentang pentingnya kerja sama, empati, solidaritas, dan pengorbanan tanpa mengharapkan imbalan adalah unsur-unsur kunci yang memperkuat hubungan sosial dan moral dalam masyarakat. Kebebasan berpendapat dan kepedulian terhadap orang lain juga menjadi landasan yang vital dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika sosial dan moral yang mendorong individu untuk memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menciptakan kerjasama yang harmonis, dan membantu mereka dalam mengatasi tantangan serta kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseluruhan, nilai-nilai humanisme dan kemanusiaan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang berbudaya dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.

BAB III

NURCHOLIS MADJID DAN PEMIKIRANNYA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pemikiran Nurcholis Madjid, seorang cendekiawan ulama terkemuka yang berpengaruh dalam dunia intelektual Islam kontemporer. Bab ini terdiri dari tiga subbagian yang akan membahas berbagai aspek penting dari pemikiran Madjid. Subbagian pertama, "Biografi dan Fondasi Pemikiran," akan menguraikan latar belakang hidup Madjid, perjalanan pendidikannya, dan elemen-elemen kunci yang membentuk pemikirannya. Subbagian kedua, "Humanisme Islam," akan menggali konsep humanisme dalam perspektif Madjid dan bagaimana ia mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemikirannya yang berakar pada Islam. Terakhir, subbagian ketiga, "Nilai-Nilai Pancasila," akan membahas pandangan Madjid tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, Bab III ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pemikiran dan kontribusi Nurcholis Madjid dalam memahami isu-isu krusial yang melibatkan Islam, humanisme, dan nilai-nilai moral di Indonesia.

A. Biografi Nurcholis Madjid

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939 (26 Muharram 1358 H). Dia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pesantren tradisional. Ayahnya, H. Abdul Madjid⁶⁵, merupakan seorang ulama yang mendapatkan pendidikan di pesantren Tebuireng, dan ia juga memiliki koneksi erat dengan keluarga besar Nahdatul 'Ulama (NU). Lebih lanjut, ayah Nurcholish Madjid memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan KH. Hasyim

⁶⁵ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, penerjemah Nanang Tahqiq*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 72

Asy'ari⁶⁶, salah satu pendiri NU, namun secara politik, ia terafiliasi dengan partai politik Islam modernis, yaitu Masjumi⁶⁷. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dan ayahnya aktif dalam Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri pada masa ketika organisasi ini masih diawasi oleh para kiai.⁶⁸

Dengan orang tua yang memiliki pemahaman agama Islam yang cukup mendalam, Nurcholish Madjid memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan banyak pengajaran dari mereka. Oleh karena itu, Abdul Madjid memiliki dampak yang besar pada Nurcholish Madjid, baik dalam hal pengetahuan maupun semangat untuk mengejar ilmu. Nurcholish Madjid sendiri pernah menyatakan bahwa minat membaca adalah salah satu hobi yang ia warisi dari ayahnya. Dia menjelaskan,

"Saya memiliki minat dalam membaca buku, dan ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari ayah saya. Ketika saya masih kecil, saya sering tidur di dekat ayah saya, dan sebelum tidur, dia selalu membaca sambil merokok. Cara ayah saya memperkenalkan kebiasaan membaca ini kepada saya juga diwariskan kepada anak-anak saya, meskipun tanpa merokok."⁶⁹

Latar belakang Pendidikan Nurcholish Madjid dimulai dengan menghadiri sekolah rakyat di desanya, Mojoanyar, yang berlangsung pada pagi hari. Sore harinya, dia belajar ilmu agama di Madrasah

⁶⁶ KH. Hasyim Asy'ari adalah salah satu pendiri organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia, yaitu NU. Abdul Madjid adalah salah satu murid favorit Kiai Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebuireng, Jombang. Selama beberapa tahun, ayah Nurcholish Madjid belajar langsung di bawah bimbingan Hasyim Asy'ari, bahkan pernah dinikahkan dengan keponakan Sang Guru, yaitu Halimah. Setelah perceraianya dengan Halimah, Abdul Madjid kemudian menikah dengan seorang gadis lain yang dipilih oleh Sang Guru, dan dari pernikahan ini lahirlah Nurcholish Madjid. Lihat di, Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 122

⁶⁷ Greg Fealy, *Voices of Islam in Southeast Asia: a Contemporary Sourcebook*, (Singapore: ISEAS Publications, 2006), hal. 220

⁶⁸ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 21

⁶⁹ Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia...*, hal. 126

Ibtida'iyah. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat dan madrasah Ibtida'iyah, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya dalam bentuk pendidikan non-formal selama dua tahun di pesantren Darul 'ulum, Rejoso Jombang, Jawa Timur.⁷⁰ Melalui latar belakang pendidikannya, dapat dilihat bahwa sejak masa kecil, Nurcholish Madjid telah mengikuti dua sistem pendidikan yang berbeda, yakni pendidikan umum (Sekolah Rakyat) dan pendidikan agama (madrasah). Dengan pendekatan pendidikan ganda ini, Nurcholish Madjid memperoleh manfaat besar karena dia memiliki pengetahuan dalam dua domain ilmu yang berbeda, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Sistem pendidikan seperti ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran dan pandangannya di masa mendatang.

Setelah itu, ia pindah ke Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah di Pondok pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan menyelesaikan pendidikannya di sana pada tahun 1960. Di tempat ini, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya untuk memperoleh pemahaman dasar-dasar agama Islam. Di pesantren tersebut, ia juga mendapatkan pengajaran yang mendalam dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pesantren ini mengharuskan para santri untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.⁷¹ Selama masa belajar di pesantren ini, Nurcholish Madjid kembali menunjukkan prestasinya sebagai salah satu siswa terbaik dengan meraih peringkat teratas di kelasnya, bahkan memungkinkan dia untuk melompat ke kelas III SMP setelah awalnya berada di kelas I.⁷²

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1965, dengan jurusan Sastra Arab dan kebudayaan Islam, dan lulus pada

⁷⁰ Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia...*, hal. 123

⁷¹ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Indramayu: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008), hal. 2332

⁷² Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia...*, hal. 123

tahun 1968. Ketika masih menjadi seorang mahasiswa, Nurcholish Madjid memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan Buya Hamka. Ini terjadi karena Nurcholish Madjid tinggal di asrama Masjid Agung al-Azhar, tempat Buya Hamka sering berada dan memimpin shalat di masjid tersebut. Selain itu, Nurcholish Madjid juga pernah menjadi staf editor di Panji Masyarakat, sebuah majalah yang didirikan dan dikelola oleh Buya Hamka, selama beberapa tahun. Hubungan dekat antara Nurcholish Madjid dan Buya Hamka berlangsung selama sekitar 5 tahun.⁷³ Pada tahun 1968, Nurcholish Madjid berhasil menyelesaikan gelar Sarjana Lengkap (Drs.) dengan judul skripsi "*al-Qur'an: 'Arabiyun Lughatan wa 'Alamiyyun Ma'nān.*" Dalam konteks ini, skripsi tersebut menguraikan bahwa Alquran dalam hal bahasa ditulis dalam bahasa Arab yang bersifat lokal, tetapi dalam hal maknanya memiliki cakupan yang bersifat universal.⁷⁴

Pada tahun 1978, Nurcholish Madjid diberikan tugas belajar di The University of Chicago, Amerika Serikat, di mana ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada tahun 1984. Disertasinya berfokus pada bidang ilmu kalam dan falsafah dan berjudul "*Ibn Taymiyah on Kalam and Falsafah, Problem of Reason and Revelation in Islam,*" dan dia lulus dengan predikat Cumlaude.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, Nurcholish Madjid dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah karena masalah pencernaan, setelah sebelumnya menjalani operasi transplantasi hati di RS Taiping, China, pada 23 Juli 2004. Kemudian, pada hari Senin, 29 Agustus

⁷³ Komaruddin Hidayat mencerminkan penghormatan dan kekaguman Nurcholish Madjid terhadap Buya Hamka dalam berbagai situasi, termasuk dalam diskusi dan saat mengajar di Paramadina. Nurcholish Madjid secara berkala menyatakan rasa hormat dan kagumnya terhadap Buya Hamka karena kemampuannya menggabungkan aspek-aspek seperti sufisme, pemahaman budaya, dan semangat Alquran. Hal ini membuat dakwah dan pandangan Islam yang diperkenalkan oleh Buya Hamka menjadi sangat berpengaruh dan efektif bagi masyarakat Islam di kota. Lihat di, Komaruddin Hidayat "Kata Pengantar", dalam Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. vi

⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, hal. vi

2005, Nurcholish Madjid meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, di hadapan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jenazahnya disemayamkan di Auditorium Universitas Paramadina, tempat dia menjabat sebagai rektor, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Setelah upacara penyerahan jenazah dari keluarga kepada negara yang dipimpin oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada tanggal 30 Agustus 2005. Acara pemakaman secara kenegaraan di TMP Kalibata dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab.⁷⁵

1. Corak Pemikiran Nurcholis Madjid

Nurcholish Madjid, seorang intelektual muslim Indonesia, memiliki beberapa ciri khas dalam pemikirannya yang cenderung realistik. Terdapat beberapa aspek yang mencirikan dan konsisten dalam pemikiran Nurcholish Madjid. *Pertama*, ia aktif dalam upaya desakralisasi wilayah-wilayah yang dianggap bersifat sekuler. Pusat pemikirannya adalah untuk mencegah instrumentalisasi agama dan politik. Jargon "*Islam ya, partai politik tidak!*" tidak sama sekali bermakna bahwa ia mendukung pemisahan agama dari negara. Sebaliknya, agama dianggap sebagai pengawal moral dalam pemerintahan negara, namun tidak harus terjalin dalam struktur partai politik. *Kedua*, dalam pemikirannya, terdapat penekanan kuat pada aspek substansial dalam praktik keberagamaan daripada ritualitas, yang lebih menitikberatkan pada perilaku religius daripada sekadar patuh terhadap hukum agama. Ini tidak mengandung makna bahwa syariah diabaikan, melainkan dianggap sebagai alat untuk mencapai substansi keagamaan. *Ketiga*, pemikiran Nurcholish Madjid mengedepankan peran agama sebagai pembebasan

⁷⁵ Liputan6, "Cak Nur Meninggal Dunia", di akses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/108166/cak-nur-meninggal-dunia>

(*rahmatan lil 'alamin*), bukan sebagai pembatas yang menyebabkan eksklusivitas atau perpecahan dalam keyakinan.⁷⁶

Setelah menyelesaikan studinya di Chicago dan meraih gelar doktoral di bawah bimbingan Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam. Ia memainkan peran penting dalam menggalakkan pembaruan pemikiran Islam dan menekankan pentingnya kaum Muslim menghargai warisan intelektual mereka sendiri dalam upaya memodernisasi pemikiran Islam. Nurcholish Madjid menyadari sepenuhnya bahwa pembaruan pemikiran Islam akan lebih kuat dan sehat jika bersumber dari tradisi intelektual Islam itu sendiri. Ini merujuk pada fakta bahwa warisan intelektual Islam bukanlah sesuatu yang kaku dan siap pakai, melainkan memerlukan interpretasi ulang dan integrasi dengan pemikiran-pemikiran modern. Hasilnya, hal ini memberikan dasar bagi terobosan-terobosan yang konstruktif di masa depan.⁷⁷

Fokus utama pemikiran Nurcholish Madjid dalam konteks pembaruan pemikiran Islam adalah bagaimana mengelola ajaran Islam yang memiliki karakter universal dan menghubungkannya secara penuh dengan realitas lokal, khususnya di Indonesia. Bagi Nurcholish Madjid, Islam pada hakikatnya sejalan dengan semangat kemanusiaan yang universal. Namun, walaupun nilai-nilai dan ajaran Islam bersifat universal, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Di dalam konteks Indonesia, hal ini juga berarti memahami kondisi sebenarnya dari masyarakat dan lingkungannya, termasuk aspek politik, dalam kerangka konsep "Negara bangsa."⁷⁸

⁷⁶ Mareta Inayatur Rohmah, *Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Menurut Nurcholis Madjid*, (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2017), hal. 76-77

⁷⁷ Dawam Raharjo, *Intelktual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hal 25-26.

⁷⁸ Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hal. 65

Nurcholish Madjid memiliki pemahaman yang kuat tentang keragaman masyarakat Indonesia, yang mencakup beragam aspek seperti etnis, budaya, suku, adat istiadat, dan agama. Dalam hal agama, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua agama, terutama agama-agama besar, telah dapat tumbuh dan mewakili aspirasinya di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk memprioritaskan isu-isu toleransi dan dialog antaragama, bahkan dapat dianggap sebagai suatu kewajiban daripada sekadar pilihan.⁷⁹

Inilah gambaran seorang cendekiawan yang telah berkontribusi signifikan dalam pemikiran untuk kemajuan umat Islam, terutama di Indonesia. Dia memiliki gagasan dan ide yang cerdas, dan pengaruhnya yang kuat datang dari Fazlur Rahman. Sosok ini berusaha mengubah pola pikir masyarakat Indonesia menuju kemajuan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Ini mencerminkan peran pentingnya dalam mempromosikan gagasan dan nilai-nilai yang mendukung perkembangan positif dan perubahan sosial dalam masyarakatnya.

2. Karya-karya Nurcholis Madjid

Sejak Nurcholish menulis pada pertengahan 1960-an, sampai tulisan terakhir di tahun-tahun menjelang wafatnya, ada sekitar 20an buku telah diterbitkan. Buku-buku tersebut sebagian besar terbit sejak Nurcholish kembali dari Chicago. Di bawah ini adalah daftar karya-karya Nurcholish Madjid:⁸⁰

- a. "*Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*" yang diterbitkan pada tahun 1987 di Bandung oleh Mizan.
- b. "*Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Kajian Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*" yang diterbitkan pada tahun 1992 di Jakarta oleh Paramadina.

⁷⁹ Nurcholis Madjid, *Prof. Dr. Nurcholish Madjid : Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 393

⁸⁰ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. xxx-xxxxi

- c. "*Pintu-pintu Menuju Tuhan*" yang diterbitkan pada tahun 1994 di Jakarta oleh Paramadina.
- d. "*Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*" yang diterbitkan pada tahun 1995 di Jakarta oleh Paramadina.
- e. "*Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*" yang diterbitkan pada tahun 1995 di Jakarta oleh Paramadina.
- f. "*Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*" yang diterbitkan pada tahun 1997 di Jakarta oleh Paramadina.
- g. "*Kaki Langit Peradaban Islam*" yang diterbitkan pada tahun 1997 di Jakarta oleh Paramadina.
- h. "*Masyarakat Religius*" yang diterbitkan pada tahun 1997 di Jakarta oleh Paramadina.
- i. Artikel berjudul "*Ibrahim, Bapak Para Nabi, dan Panutan Ajaran Kehanifan*" yang dimuat dalam Seri KKA ke-124/Tahun XII/1997 yang diterbitkan oleh Paramadina.
- j. "*Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*" yang diterbitkan pada tahun 1997 di Jakarta oleh Paramadina.
- k. "*30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*" yang diterbitkan pada tahun 1998 di Bandung oleh Mizan.
- l. "*Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*" yang diterbitkan pada tahun 1998 di Jakarta oleh Paramadina.
- m. "*Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*" yang diterbitkan pada tahun 1999 di Jakarta oleh Tekad dan Paramadina.
- n. "*Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jumat di Paramadina*" yang diterbitkan pada tahun 2000 di Jakarta oleh Paramadina.
- o. "*Perjalanan Religius 'Umrah dan Haji*" yang diterbitkan pada tahun 2000 di Jakarta oleh Paramadina.
- p. "*Fatsoen Nurcholish Madjid*" yang diterbitkan pada tahun 2002 di Jakarta oleh Penerbit Republika.

- q. "*Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jumat di Paramadina*" yang diterbitkan pada tahun 2002 di Jakarta oleh Paramadina.
- r. "*The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia*" yang diterbitkan pada tahun 2003 di Jakarta oleh Voice Center Indonesia.
- s. "*Indonesia Kita*" yang diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta oleh Gramedia.
- t. Artikel berjudul "*The Foundation of Faith for Fiqh Interfaith*" yang dimuat dalam buku "*Interfaith Theologi: Responses of Progressive Indonesian Muslim*" yang diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta oleh International Center for Islam and Pluralism.

B. Humanisme Islam

Dalam era saat ini yang dipengaruhi oleh dominasi Barat, terutama Amerika, demokrasi adalah nilai yang sangat dihargai. Namun, sejarah demokrasi adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip humanisme yang pertama kali dikenalkan dan dipahami oleh pemikir Yunani kuno. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, dan ide tentang demokrasi, menurut pandangan Barat, juga bersumber dari pemikiran dan percobaan politik orang-orang Yunani dalam sejarah mereka. Prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan perlindungan hak individu telah menjadi landasan masyarakat demokratis modern. Meskipun demokrasi telah berkembang dan bervariasi seiring berjalannya waktu, warisan pemikiran Yunani dalam konteks demokrasi tetap memegang peran penting dalam pemahaman dan pengembangan konsep ini di dunia saat ini.⁸¹

Namun, humanisme Yunani telah mengalami kemunduran dan tidak ada lagi perkembangan hampir dua ribu tahun yang lalu. Kemudian, ada indikasi bahwa pemikiran humanisme kembali

⁸¹ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 4135

mendapatkan perhatian di kalangan orang-orang Barat setelah mereka berinteraksi dengan ajaran Islam. Ini terlihat dalam pidato ilmiah yang disampaikan oleh Giovanni Pico della Mirandola, seorang filsuf humanis dari masa Renaisans Eropa, di hadapan para pemimpin gereja. Dalam pidatonya, ia memulai dengan mengutip seorang Muslim Arab, Abdullah, yang menganggap manusia sebagai sesuatu yang paling menakutkan di dunia. Hermes Trimegistus juga mengungkapkan pandangan serupa bahwa manusia adalah suatu keajaiban yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran humanis di Eropa pada masa tersebut.⁸²

Dalam kutipan tersebut, Giovanni Pico della Mirandola membandingkan apa yang ia pelajari dari buku-buku kaum Muslim dengan ucapan Hermes Trimegistus kepada Asclepius, yang keduanya mengungkapkan pandangan yang sangat menghargai martabat manusia. Ini adalah akar dari pandangan humanisme atau kemanusiaan. Eropa (Barat) memang kemudian mengadopsi pandangan humanisme yang berasal dari tradisi Yunani kuno. Namun, seiring waktu, humanisme tersebut terlepas dari kerangka ajaran keagamaan dan berkembang menjadi elemen penting dalam pemikiran sekular Barat. Saat ini, humanisme yang bersifat sekuler menjadi target kritik dari kelompok-kelompok pascamodernis, meskipun mereka juga belum sepenuhnya mengidentifikasi paham alternatif yang jelas, dan masih terjebak dalam ketidakpastian.

Menurut Huston Smith, seorang pemikir, filsuf, dan ahli perbandingan agama, ketidakjelasan yang kita hadapi dalam dunia pasca-modernisme adalah definisi yang paling dalam. Dua hal ini hampir menjadi satu dan sama. Baru-baru ini, dalam resensi delapan buku yang semuanya mencakup kata "pasca-modernisme" dalam judulnya, mereka mengalami kesulitan mencapai kesimpulan yang jelas tentang apa arti kata tersebut. Hal ini mungkin benar jika kita

⁸² Ernst Cassirer, *The Renaissance Philosophy of Man*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1948), hal. 223

berbicara dengan para intelektual, tetapi ada titik temu penting di mana mereka memahami definisi-definisi tersebut. Jika Anda merasa bingung tentang apa yang sedang terjadi di zaman ini, maka Anda bisa dianggap sebagai seorang pascamodern. Simone Weil pernah mengatakan, "Siapa pun yang tidak bingung dalam zaman ini, dia mungkin tidak berpikir dengan benar."⁸³

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, ketidakjelasan dan kebingungan yang manusia alami saat ini adalah ciri utama zaman pasca-modernisme. Pasca-modernisme mengindikasikan tahap perkembangan zaman sekarang ini. Oleh karena itu, umat manusia secara keseluruhan memerlukan pegangan baru. Namun, pegangan "baru" tersebut haruslah orisinal, yang berarti manusia harus kembali kepada sifat asli atau fitrah yang suci, yang pada dasarnya diajarkan dalam ajaran agama. Dari sini, manusia dapat mengidentifikasi beberapa prinsip pandangan kemanusiaan dalam Islam, yaitu bahwa manusia memiliki hubungan yang sudah ada sejak lama dengan Tuhan, bahwa manusia, sejak awal kehidupannya dalam dimensi rohani, telah berkomitmen untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi dalam hidupnya.⁸⁴

Manusia menurut Nurcholis Madjid lahir dalam kesucian asal atau fitrah yang mengarahkannya pada kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan sabda Nabi saw yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kesucian. Kesucian asal ini bersemayam dalam hati nurani manusia dan mendorongnya untuk selalu mencari, memihak pada yang baik, dan berperilaku yang benar. Namun, manusia juga memiliki potensi untuk berbuat salah karena sifat kelemahannya dan kecenderungannya kepada kepuasan segera. Untuk membimbing kehidupan manusia, agama dan akal pikiran diberikan sebagai sarana, dan manusia memiliki kewajiban untuk terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar, dan baik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk etis dan moral, yang artinya

⁸³ Huston Smith, *Forgotten Truth*, (San Francisco: HarperCollins, 1992), hal. Vi-vii.

⁸⁴ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 4136-4137

perbuatan baik dan buruk harus dipertanggungjawabkan, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia di dunia ini maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁵

Berbeda dengan tanggung jawab di dunia yang relatif dan masih memungkinkan manusia menghindarinya, tanggung jawab di akhirat bersifat mutlak dan tidak dapat dihindari sama sekali. Pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat adalah hal yang sangat pribadi, sehingga tidak ada pertahanan, dukungan kolektif, atau aliansi yang dapat digunakan, bahkan antara teman-teman, keluarga, anak-anak, dan orang tua. Semua asumsi ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap individu manusia, dalam kehidupan dunia, memiliki hak dasar untuk membuat pilihan dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya, tanpa hak ini, tanggung jawab moral dan etis terhadapnya tidak akan ada.⁸⁶

Karena esensi yang mulia ini, manusia dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam penciptaan Allah, yang aslinya diberikan derajat dan martabat yang paling mulia. Allah menghormati dan melindungi keturunan Adam ini di seluruh penjuru daratan dan lautan. Setiap individu manusia memiliki nilai yang sangat berharga, yang mewakili martabat kemanusiaan secara global. Oleh karena itu, siapa pun yang merugikan individu secara tidak sah, seperti mengambil nyawanya tanpa alasan yang valid, dianggap merugikan seluruh umat manusia. Dan siapa pun yang berbuat baik kepada individu lain, seperti menyelamatkan nyawanya, dianggap berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Inilah alasan mengapa setiap individu manusia harus berperilaku baik terhadap sesamanya, memenuhi kewajiban pribadinya terhadap individu lain, dan menghormati hak-hak orang lain dalam hubungan sosial yang damai dan saling menghormati.

Inilah paham humanisme Islam, yang secara padat diringkas dalam kata amal saleh, yang dilambangkan dalam makna dan

⁸⁵ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 4138

⁸⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 4139

semangat ucapan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri pada akhir salat. Humanisme ini perlu dikembalikan kembali oleh umat Islam, agar umat Islam dapat mengapresiasi modernitas secara otentik berdasarkan ajaran agama yang sah.⁸⁷

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam pandangan Nurcholis Madjid, humanisme Islam menyiratkan bahwa manusia memiliki fitrah yang suci yang mendorongnya menuju kebaikan dan kebenaran. Manusia memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan benar serta memiliki hak dasar untuk membuat pilihan moral dan etis. Pada saat yang sama, manusia juga rentan terhadap kesalahan karena sifat kelemahannya. Untuk membimbing perilaku manusia, agama dan akal pikiran diberikan sebagai sarana, dan manusia memiliki kewajiban untuk terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang benar dan baik. Pertanggungjawaban moral dan etis terhadap tindakan manusia di dunia ini relatif dan dapat dihindari, tetapi pertanggungjawaban mutlak di akhirat kepada Tuhan bersifat pribadi dan tidak dapat dielakkan. Setiap individu manusia memiliki nilai yang sangat berharga, yang mewakili martabat kemanusiaan secara global, sehingga merugikan individu tanpa alasan yang sah dianggap merugikan seluruh umat manusia. Sebaliknya, berbuat baik kepada individu lain dianggap sebagai tindakan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Pemahaman humanisme Islam ini, yang tercermin dalam tindakan nyata seperti amal saleh dan salam dalam salat, perlu diperkenalkan kembali kepada umat Islam agar mereka dapat mengapresiasi modernitas secara otentik berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama yang benar.

C. Nilai-Nilai Pancasila

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia sangat kuat, terutama dalam konteks kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam pandangannya, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila memiliki banyak persamaan. Ia mengidentifikasi

⁸⁷ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 4140

keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan beberapa konsep dalam Pancasila, seperti keadilan, budi pekerti, kedaulatan rakyat, kebijaksanaan, musyawarah, dan perwakilan. Madjid menunjukkan bahwa para ulama sering memegang teguh konsep bahwa "pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah," dan hal ini sejalan dengan semangat Pancasila.⁸⁸

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hidup berdampingan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi positif dengan menguatkan dan memperkaya pemahaman nilai-nilai dasar negara. Bagi Madjid, Islam adalah bagian integral dari budaya Indonesia dan memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai yang menghormati pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Dari contoh yang diambil dari dasar negara dan kata-kata pinjaman bahasa Arab lainnya, baik langsung maupun melalui perantara bahasa ketiga, dapat kita lihat bahwa pengaruh Islam yang paling signifikan pada budaya Indonesia terletak pada domain konsep-konsep sosial dan politik. Anthony H. Johns mengemukakan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena ini dengan baik dalam konteks Islam di Asia Tenggara. Johns menekankan pentingnya keanggotaan dalam komunitas, di mana keteraturan hukum menjadi elemen kunci. Salah satu dasar bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-13 adalah stabilitas dan keamanan dalam dunia perdagangan yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum perdagangan Islam di antara para anggota komunitas pedagang Muslim dan mitra perdagangan mereka.⁸⁹

Fakta tersebut juga mengindikasikan mengapa Islam memiliki daya tarik yang kuat dan akhirnya menjadi agama utama di wilayah Nusantara ini. Terkait dengan hal ini, pendapat Bill Dalton, seorang antropolog dan penulis *Indonesia Handbook* yang dikenal sebagai panduan wisata Indonesia yang informatif, dapat diperhatikan:

⁸⁸ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 124

⁸⁹ Anthony H. Johns, "Islam in the Malay World," dalam Raphael Israeli dan Anthony H. Johns, eds., *Islam in Asia*, (Jerusalem: The Magnes Press, 1984), hal. 117.

Apa yang membuat Islam begitu menarik? ... Daya tarik utamanya adalah aspek psikologis. Ketika Islam datang pertama kali ke kepulauan ini, ia membawa konsep revolusioner yang sangat kuat, yaitu egaliter dan penuh semangat ilmiah, yang membebaskan masyarakat dari belenggu feodalisme yang ditetapkan oleh agama Hindu. Masyarakat pada saat itu hidup dalam negara di mana raja adalah penguasa mutlak yang memiliki wewenang untuk merampas harta benda dan bahkan istri mereka kapan saja sesuai keinginannya. Islam mengajarkan bahwa di mata Allah, semua individu sama dan berasal dari tanah, tanpa ada yang lebih unggul dari yang lain. Dalam Islam, tidak ada upacara sakramen atau inisiasi yang misterius, dan tidak ada golongan khusus pendeta. Islam memperlihatkan kesederhanaan yang besar dengan mengedepankan hubungan langsung dan personal antara manusia dengan Tuhan.⁹⁰

Meskipun beberapa ungkapan tentang nilai-nilai Pancasila mungkin terdengar klise, perlu dipahami relevansinya. Nilai-nilai Pancasila seharusnya dipahami sebagai titik temu untuk semua pandangan hidup yang ada di Indonesia, termasuk yang terdapat dalam ajaran agama. Nilai-nilai Pancasila, baik yang potensial maupun yang aktual, seharusnya terkandung dalam ajaran agama-agama yang ada, karena yang mencari makna dan tujuan hidup dalam agama-agama tersebut seharusnya dapat menerima nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya dianggap sebagai titik temu antar agama di Indonesia. Sebagaimana perintah agama, mencari, menemukan, dan menggalang persatuan di antara komunitas yang beragam adalah sesuatu yang dikehendaki oleh agama itu sendiri.

Berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan di atas, tampaknya sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya fokus pada keterampilan teknis dan keahlian semata. Meskipun penting untuk memiliki keterampilan dan keahlian teknis, yang benar-benar penting adalah memandang manusia secara menyeluruh, sebagai subyek yang aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai

⁹⁰ Bill Dalton, *Indonesia Handbook*, (Chico, California: Moon Publications, 1982), hal. 6

objek yang menerima pembangunan. Dalam perspektif ini, keterampilan dan keahlian teknis semuanya memiliki nilai yang bersifat alat atau instrumental, bukan nilai yang melekat. Oleh karena itu, semua nilai instrumental tersebut harus digunakan untuk mengabdikan kepada nilai-nilai intrinsik yang berkaitan dengan kemanusiaan itu sendiri, dan bukan sebaliknya, yaitu menjadikan manusia berharga hanya berdasarkan keterampilan dan keahliannya.

Dengan dasar ini, semua pemeluk agama diwajibkan untuk mengamalkan agama mereka dengan baik. Nurcholis Madjid mengemukakan pandangan yang sangat penting tentang hubungan antara Islam dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Indonesia. Ia merumuskan bahwa seorang Muslim yang taat adalah seseorang yang pada hakikatnya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya sehari-hari. Ini adalah pandangan yang memiliki implikasi yang dalam terhadap pemahaman tentang agama, kewarganegaraan, dan identitas kebangsaan.

Pertama-tama, Nurcholis Madjid menyoroti nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dasar negara Indonesia. Pancasila mencakup lima sila atau prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai-nilai yang menjadi dasar bagi negara Indonesia dan menggambarkan visi dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nurcholis Madjid kemudian menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam. Menurutnya, seorang Muslim yang taat akan secara otomatis mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, nilai pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan Muslim pada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan martabat manusia dalam Islam. Begitu pula

dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pandangan egaliter yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.⁹¹

Pandangan Nurcholis Madjid mencerminkan upayanya untuk mempromosikan harmoni dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia di tengah perbedaan budaya, agama, dan etnis. Baginya, Islam dapat membawa nilai-nilai positif yang mendorong partisipasi, musyawarah, dan keadilan dalam tatanan sosial dan politik Indonesia yang sesuai dengan semangat Pancasila. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah "titik temu" bagi semua pandangan hidup yang ada di Indonesia, termasuk pandangan hidup yang diwakili oleh agama-agama. Ia juga menyatakan bahwa Pancasila selaras dengan poin-poin perintah agama. Sehingga, mencari, menemukan, dan mengajak masyarakat untuk bersatu dalam Pancasila adalah bagian dari tugas agama. Ini adalah pandangan yang mendukung integrasi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai negara. Dalam hal ini, Islam dan Pancasila tidak saling bersaing atau bertentangan, melainkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.⁹²

Selain itu, pandangan Nurcholis Madjid mencerminkan pandangan tentang pluralisme dan toleransi. Ia memandang bahwa nilai-nilai Pancasila adalah relevan untuk semua warga negara Indonesia, tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga bagi penganut agama-agama lain. Ini adalah konsep inklusif yang menghormati keragaman budaya dan agama dalam masyarakat. Dengan demikian, ia berusaha mempromosikan kesatuan dalam keberagaman.

Sebagai dampak dari tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan menerapkan Pancasila, masyarakat perlu mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam membangun lembaga-lembaga negara. Pembangunan lembaga-lembaga ini akan menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menjadi

⁹¹ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. ixixiii

⁹² Wiligis Eduardus Edrin Olak Wuwur, "Pancasila dalam Perspektif Cak Nur", dalam Budhy Munawar-Rachman, dkk, *Pemikiran Islam Nurcholis Madjid*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hal. 353-354

kerangka acuan utama bagi negara ini dalam menghadapi perubahan dan menangani permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perubahan tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan strategi pembangunan sumber daya manusia di bidang sosial dan budaya yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki ketuhanan, yakni "upaya untuk membentuk manusia yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa."⁹³

Dalam keseluruhan konteksnya, pandangan Nurcholis Madjid mengenai Islam dan Pancasila menciptakan landasan penting untuk harmoni antara agama dan negara di Indonesia. Ia berpendapat bahwa Islam, ketika dihayati dan diamalkan secara benar, dapat menjadi sumber inspirasi bagi partisipasi positif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Pandangan ini menekankan pentingnya nilai-nilai universal yang menghubungkan agama dan nilai-nilai negara, yang pada gilirannya menciptakan kerukunan dan keadilan dalam masyarakat.

Apabila diganti ungkapan "manusia yang ber-Ketuhanan Yang Mahaesa" dengan beberapa terminologi keagamaan yang sering digunakan di Indonesia, maka konsep dan semangatnya sejalan dengan "beriman" dan "bertakwa." Dalam hal ini, Nurcholis Madjid mengidentifikasi bahwa ini akan menghasilkan nilai-nilai berikut:⁹⁴

- a. Manusia tidak dibenarkan menganggap sesuatu selain Tuhan Yang Mahaesa sebagai yang paling utama. Mengakui Tuhan Yang Mahaesa sebagai yang paling utama berarti menyadari bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya memahaminya.
- b. Oleh karena itu, Tuhan tidak dapat dipahami sepenuhnya, tetapi harus diakui sebagai asal dan tujuan hidup. Sebagai hasilnya, manusia harus mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan keridhaan Tuhan.

⁹³ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 2972

⁹⁴ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, hal. 2973-2976

- c. Tidak mengutamakan apapun selain Tuhan Yang Mahaesa berarti tidak menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai tujuan hidup. Ini termasuk menghindari sikap egois dan tidak ikhlas.
- d. Pandangan hidup ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk puncak ciptaan Tuhan yang lebih tinggi dari makhluk lain di alam semesta.
- e. Dengan demikian, Tuhan telah memberikan martabat tinggi kepada manusia. Manusia harus menjaga martabatnya dengan tidak menganggap alam atau makhluk lain lebih tinggi dari dirinya sendiri.
- f. Manusia adalah makhluk yang baik dan harus berbuat baik terhadap sesama, karena setiap individu memiliki fithrah atau kebaikan asal.
- g. Alam adalah ciptaan Tuhan yang baik, dengan hukum-hukum yang konsisten dan berlaku baik secara umum maupun secara spesifik.
- h. Manusia harus menghargai alam sebagai manifestasi Tuhan, menghayati keagungan-Nya, dan menggunakannya untuk kesejahteraan spiritual dan material.
- i. Dengan memperhatikan alam, manusia dapat memanfaatkannya dengan bijaksana melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Manusia memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga dunia sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku secara utuh, dengan berfokus pada kualitas hidup yang lebih baik.
- k. Manusia harus menjaga konsistensi dan keutuhan dalam menjalani hidup yang mengarah kepada keridhaan Tuhan.
- l. Perbuatan baik terhadap sesama adalah jalan menuju keridhaan Tuhan, yang tidak hanya berarti mengikuti ajaran agama secara formal, tetapi juga menjalankan tindakan nyata yang baik.
- m. Manusia harus bekerja dengan baik, menggunakan waktu dengan produktif, dan selalu memelihara kesadaran akan Tuhan.

- n. Manusia harus menyadari bahwa segala perbuatan, baik dan buruk, akan dipertanggungjawabkan di Hari Kemudian di hadapan Tuhan.
- o. Keimanan memberikan kebebasan kepada manusia karena hanya tunduk kepada Tuhan semata, dengan ibadah yang hanya ditujukan kepada-Nya.
- p. Dengan keimanan, manusia memiliki tanggung jawab hidup yang besar dan harus memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia, menciptakan perdamaian dan saling membantu.
- q. Perbedaan antara sesama manusia harus diterima sebagai kehendak Tuhan, dan pluralitas yang sehat memungkinkan kompetisi kebaikan.
- r. Semua tindakan manusia akan diperhitungkan oleh Tuhan, yang selalu hadir dan tahu segala sesuatu.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nurcholis Madjid memandang bahwa Islam memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia, terutama dalam rumusan nilai-nilai Pancasila yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pandangannya, nilai-nilai Islam dan Pancasila saling mendukung, menciptakan harmoni di antara budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Nilai-nilai Islam dan Pancasila saling berkaitan, seperti keadilan, etika, musyawarah, dan demokrasi, yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam Pancasila. Madjid menganggap bahwa Islam, jika dipahami dengan benar, akan mendorong partisipasi positif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Pandangannya menekankan relevansi dan inklusivitas nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang beragam, dan bahwa Pancasila seharusnya dianggap sebagai titik temu untuk semua pandangan hidup yang ada di Indonesia, termasuk dalam ajaran agama. Selain itu, Madjid juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan keutuhan dalam hidup yang mengarah kepada keridhaan Tuhan. Ini adalah pandangan yang mendukung harmoni antara agama dan negara serta menekankan tugas agama untuk mempromosikan persatuan dalam keberagaman masyarakat.

Pandangan ini menciptakan dasar penting untuk pemahaman tentang kesejajaran dan saling melengkapi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai dasar negara Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan kerukunan dan keadilan dalam masyarakat.

BAB IV

ISLAM DAN KEMANUSIAAN DALAM PANCASILA

A. Islam sebagai Fondasi Kemanusiaan

Islam dianggap sebagai agama yang membawa perubahan positif dalam masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai spiritual dan moral. Tingkat ketaatan yang tinggi kepada Allah mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang penuh dengan kebajikan dan moralitas. Pengetahuan tentang syari'at memainkan peran penting dalam membimbing perilaku umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, Islam juga dilihat sebagai solusi untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ajaran-ajaran agama ini mendorong umatnya untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama, menciptakan masyarakat yang peduli dan adil. Dengan pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, diharapkan umat bisa terbebas dari beban kemiskinan dan kebodohan yang seringkali menghambat perkembangan masyarakat.⁹⁵

Pandangan Nurcholish Madjid menambah dimensi filosofis pada pemahaman ini. Konsep ketuhanan (keimanan), persamaan hak dan martabat manusia, serta prinsip kebebasan menjadi pijakan untuk mewujudkan semangat kemanusiaan. Keimanan kepada Tuhan menjadi motivasi untuk berbuat baik, sementara prinsip persamaan hak dan martabat manusia menggarisbawahi pentingnya menghormati dan memperlakukan setiap individu dengan adil. Prinsip kebebasan menekankan pentingnya masyarakat yang bersifat egaliter, terbuka, dan adil secara sosial.⁹⁶

⁹⁵ Jalaluddin Rakhmata, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 2004), Cet. Ke-12, hal. 43-44.

⁹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. xxi

1. Prinsip Ketuhanan (Keimanan)

Keyakinan dan kesadaran bahwa hanya Tuhan Yang Satu dan Maha Esa yang layak untuk disembah merupakan aspek yang sangat fundamental dan otentik dalam ajaran Islam, yang dikenal sebagai tauhid. Dalam konteks teologis, konsep dasar ini dengan tegas dan jelas memiliki dasar yang kuat dalam Al-quran. Di sisi lain, dari segi filosofis, meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan relatif bersifat nisbi. Oleh karena itu, tidak ada entitas Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa yang patut dihormati dan layak untuk dimohon pertolongan dan karunia-Nya.

Tuhan yang hakiki adalah Yang Maha Esa, selalu hadir dalam kehidupan ini dengan pengawasan yang konstan terhadap setiap langkah kita. Keridhaan-Nya menjadi pedoman utama yang harus dijadikan arah hidup, dipandu oleh hati nurani yang murni, mengikuti jalan yang benar. Tuhan adalah sumber dan tujuan kehidupan manusia serta segala yang ada di dalamnya, sesuai dengan pemikiran Nurcholish Madjid.⁹⁷

Dalam pernyataan syahadat "Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh," Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa kesaksian pertama tersebut mencakup apa yang umumnya dikenal sebagai pernyataan penolakan dan pengukuhan, yaitu pengingkaran dan konfirmasi. Melalui pengingkaran, kita membebaskan diri dari segala keyakinan yang tidak benar, sehingga tidak terikat dan tidak merugikan derajat kemanusiaan kita sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Sementara itu, melalui konfirmasi, kita tetap menyatakan keberadaan Tuhan yang Maha Tinggi sejati. Bagi Madjid, tidak cukup hanya meyakini adanya Tuhan, tetapi sekaligus menolak segala sesuatu selain Tuhan sebagai tuhan, yang pada hakikatnya tidak memiliki sifat

⁹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemoderanan*, Cet, Ketiga, (Jakarta: paramadina, 1995), hal. ii

keilahiaan dan dalam konteks agama disebut sebagai musyrik, yakni menyekutukan Tuhan dengan yang lain.⁹⁸

Dengan demikian, menurut Nurcholish Madjid, meyakini keberadaan Tuhan sebagai Wujud Tertinggi yang menjadi kekuatan luar biasa dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebatas keyakinan akan keberadaan-Nya. Lebih dari itu, tauhid memiliki makna yang lebih dalam, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki kualitas keilahian yang unik dan tidak ada kualitas serupa pada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang berhasil merealisasikan konsep ini dalam dirinya, itulah saat seseorang benar-benar menerapkan tauhid, sesuai dengan ungkapan Madjid.

2. Persamaan Harkat dan Martabat Manusia

Ajaran egalitarianisme atau konsep persamaan manusia dalam agama Islam sangat kuat, menegaskan bahwa semua manusia setara. Seluruh makhluk memiliki iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa (*rabbânîyah*), yang mencerminkan nilai-nilai yang diilhami oleh kesadaran bahwa kehidupan berasal dari Tuhan dan menuju kepada-Nya (*Innâlî-lâh-i wa innâ ilayh-râji'ûn*) — artinya, "Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada-Nya." Oleh karena itu, Tuhan dianggap sebagai prinsip dasar serta tujuan hidup bagi seluruh makhluk.

Manusia, sebagai penciptaan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian diberikan tanggung jawab sebagai wakil-Nya di bumi. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik dalam kehidupan ini maupun di Pengadilan Illahi di akhirat nanti. Meskipun manusia menduduki posisi yang paling istimewa di antara makhluk lainnya, hal ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa manusia juga memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang paling rendah.⁹⁹

Seseorang perlu menunjukkan sikap tunduk dan patuh

⁹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. ii

⁹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. 4.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berperilaku baik terhadap sesama, agar dapat mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, sikap tunduk yang diajarkan dalam agama Nabi Ibrahim a.s. mengajarkan manusia untuk berserah diri dengan sepenuh hati, tulus, dan damai (islâm) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan merupakan inti dan hakikat dari agama dan keagamaan yang benar.¹⁰⁰

Bersikap tunduk kepada Tuhan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah pengakuan tulus bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber otoritas yang memiliki kekuasaan mutlak. Pengakuan ini sejalan dengan hakikat konsep ketuhanan, yaitu keyakinan bahwa Tuhan adalah Wujud Mutlak, sebagai sumber dari segala wujud yang ada. Dengan demikian, segala wujud lainnya hanya bersifat relatif, sebagai perbandingan atau lawan dari Wujud dan Hakikat yang absolut.

Bersikap tunduk kepada Tuhan adalah jalur langsung menuju kepada-Nya, karena sikap tersebut berakar dalam lubuk hati paling dalam individu manusia. Dalam semangat penyerahan diri, terdapat kerinduan yang mendalam terhadap Kebenaran, yang pada tingkat tertingginya adalah keinginan untuk bersatu dengan Tuhan. Untuk mendekat atau bertemu dengan Tuhan, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan penuh kesungguhan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan hubungan yang lurus dan terus-menerus antara diri manusia dan Tuhan.¹⁰¹

Suatu kelanjutan logis dari prinsip ketuhanan adalah pemahaman mengenai persamaan manusia. Ini berarti bahwa semua individu, dalam hal hak dan martabat dasarnya, memiliki kesamaan. Tidak ada yang berhak merendahkan atau mendominasi hak dan martabat manusia lainnya, termasuk dengan cara memaksa pandangan atau kehendaknya pada orang lain. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak memiliki hak untuk

¹⁰⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. 4.

¹⁰¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. 4

melakukan tindakan memaksa tersebut. Peran seorang utusan Tuhan hanyalah menyampaikan kebenaran (*balâgh*, *tablîgh*) kepada umat manusia, bukan untuk memaksa kebenaran tersebut kepada mereka.

Karena manusia tidak mampu memahami Kebenaran Mutlak, walaupun pengetahuannya seberapa pun tinggi, tetap memiliki batasan. Oleh karena itu, setiap individu diminta untuk bersikap rendah hati agar dapat mengakui bahwa kemungkinan orang lain memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Manusia perlu selalu menyadari bahwa selalu ada Yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk saling mendengarkan satu sama lain dan saling mengingatkan mengenai hal-hal yang benar dan baik.

Manusia adalah ciptaan yang diberikan kehormatan oleh Tuhan, baik di daratan maupun di lautan. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk saling menghormati sesama dan menjalankan kewajiban untuk berdiskusi bersama dalam segala hal. Musyawarah menjadi suatu keharusan karena setiap individu manusia memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Adanya variasi kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang menjadikan setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, namun hal tersebut tidak mengurangi kesamaan manusia dalam hak dan martabatnya.¹⁰²

Egalitarianisme, konsep kesetaraan manusia, menjadi pondasi utama bagi demokrasi yang mengedepankan musyawarah yang benar. Demokrasi yang sesungguhnya tidak dapat terwujud secara optimal tanpa dasar pandangan yang kuat tentang persamaan hak dan martabat setiap individu. Sebaliknya, sistem demokrasi akan terhambat apabila terdapat stratifikasi sosial yang kaku dan baku dalam struktur paternalistik dan feodalistik, yang dapat menghambat partisipasi setara semua anggota masyarakat. Dengan demikian, kesetaraan manusia menjadi prinsip krusial yang menjaga integritas demokrasi dan mencegah terjadinya

¹⁰² Nurcholish madjid, *Doktrin Islam dan Peradaban*, hal. 7

ketidaksetaraan yang merugikan bagi perkembangan sistem demokratis.¹⁰³

Manusia dianggap sebagai makhluk tertinggi yang merupakan puncak ciptaan Tuhan. Ajaran ini mencerminkan tingginya derajat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam konteks firman tersebut juga diungkapkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menurun derajatnya menjadi makhluk yang paling rendah, kecuali bagi mereka yang mempertahankan iman dan berperilaku baik. Dengan kata lain, meskipun manusia memiliki kedudukan tinggi, tetapi eksistensinya rentan terhadap penurunan derajat kecuali jika dijaga oleh iman dan amal perbuatan yang baik.¹⁰⁴

Perjuangan untuk meraih dan menjaga harkat serta martabat kemanusiaan adalah ciri khas dari rangkaian pengalaman hidup manusia, terutama sebagai makhluk sosial. Al-Qur'an mengakui "ketinggian martabat manusia," menandakan bahwa Tuhan memberikan kehormatan yang luar biasa kepada manusia di antara seluruh ciptaan-Nya. Penegasan bahwa perjalanan hidup manusia secara sosial dipenuhi dengan upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan derajat kemanusiaan, sejalan dengan pengakuan Al-Qur'an tentang kemuliaan manusia di hadapan Tuhan.¹⁰⁵

Tuhan merupakan satu-satunya sumber otoritas yang memiliki kebenaran tertinggi. Dengan kata lain, tidak seorang pun dari ciptaan-Nya, termasuk manusia yang relatif dan terbatas, dapat mengklaim secara mutlak atau memonopoli kebenaran untuk dirinya sendiri atau orang lain. Apabila seseorang menyatakan bahwa hanya pendapatnya yang benar dan secara bersamaan menganggap orang lain sepenuhnya salah, maka ia telah terjerumus dalam pemikiran yang menyekutukan Tuhan

¹⁰³ Budhy Munawar Rachman, Elza Peldi Taher. @fileCaknur: *Banyak Jalan Menuju Tuhan*, hal. 135.

¹⁰⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hal. 3

¹⁰⁵ Marcel A. Boisard. *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1980), hal. 116.

atau kemusyrikan. Orang semacam ini, seperti yang dijelaskan oleh Cak Nur, disebut sebagai thagut atau tiran, yang mencerminkan sikap yang selalu ingin memaksakan pandangannya kepada orang lain tanpa memberikan kesempatan untuk pertimbangan yang bebas dan adil.¹⁰⁶

Dalam perspektif Cak Nur, belenggu atau tiran yang kerap membuat manusia sombong dan angkuh terhadap kebenaran yang berasal dari luar dirinya disebut sebagai "hawa nafsu." Hawa nafsu ini menjadi akar dari pandangan-pandangan subjektif yang secara otomatis menghalangi seseorang untuk memahami kebenaran. Tanpa disadari, individu tersebut sejatinya menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang selalu diikuti dan ditaati. Karena sifat dasar hawa nafsu yang bersifat tiran dan menghambat kebebasan individu untuk mencapai kebenaran sejati, akibatnya, mereka terperangkap dalam kepompong kesalahan dan kebodohan. Lebih lanjut, individu tersebut cenderung menjadi tertutup dan fanatik, yang menyebabkan reaksi yang bersifat defensif terhadap segala hal yang datang dari luar tanpa melakukan pertanyaan atau refleksi terhadap kemungkinan kebenaran yang mungkin terkandung di dalamnya.¹⁰⁷

Oleh karena itu, Cak Nur menegaskan bahwa segala bentuk organisasi sosial yang menciptakan kekuasaan mutlak di antara manusia bertentangan dengan prinsip tauhid. Pengaturan hidup yang memberikan kekuasaan mutlak kepada sesama manusia dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap tunduk secara penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan adanya struktur sosial yang adil, terbuka, dan demokratis, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁸

Dampak lain yang dapat disimpulkan adalah munculnya pemahaman mengenai persamaan manusia yang bersifat egaliter

¹⁰⁶ Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, hal. 126

¹⁰⁷ Nurcholish madjid, *Doktrin Islam dan Peradaban*, hal. 28

¹⁰⁸ Nurcholish madjid, *Doktrin Islam dan Peradaban*, hal. 4

dan sejajar antara satu dengan yang lainnya. Ini terlihat melalui perspektif harkat dan martabat manusia sebagai dasar humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki hak untuk merendahkan atau mendominasi harkat dan martabat manusia lain, seperti melakukan pemaksaan terhadap kehendak dan pandangan mereka.¹⁰⁹

Dengan demikian, setiap individu memiliki hak dan kebebasan pribadinya, menjadikannya makhluk moral yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang diambil, yang diatur oleh petunjuk agama dan akal pikirannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Menurut Cak Nur, hal ini menyiratkan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk memilih dan menentukan perilaku moral dan etisnya. Tanpa kebebasan ini, adalah tidak rasional untuk menuntut pertanggungjawaban dari manusia. Ini menjadi salah satu kehormatan tertinggi, dan pada saat yang sama, membedakan derajat dan martabat manusia dari makhluk Tuhan lainnya.

Untuk memelihara derajat dan martabatnya, manusia diharapkan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara simbolis, Cak Nur menyatakan bahwa manusia seharusnya memandang ke atas hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, ke arah alam seharusnya memandang ke bawah, dan terhadap sesamanya manusia seharusnya melihat secara mendatar atau horizontal. Dengan cara ini, Cak Nur menegaskan bahwa manusia dapat menemukan esensi alamiahnya sebagai makhluk dengan derajat dan martabat yang tinggi.

Dengan kata lain, manusia dapat menemukan keutuhan, integritas, dan keaslian kepribadiannya hanya jika dia mengarahkan orientasi transendentalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, jika manusia menempatkan nilai dan martabatnya pada sesamanya, terutama pada objek seperti fenomena alam, maka ia akan kehilangan kebebasannya. Hal ini

¹⁰⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 191-193

pada akhirnya akan mengakibatkan kehilangan peluang dan potensi untuk mengembangkan diri ke tingkat yang paling tinggi.

Jadi, menurut pandangan Cak Nur, dengan menjadikan tauhid sebagai dasar orientasi kehidupan, manusia akan menjadikan ridha Tuhan sebagai titik acuan bagi segala perbuatannya; Tuhan menjadi asal dan tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia meletakkan dirinya berdasarkan fitrahnya yang otentik dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang membatasi kebebasan pribadinya. Hal ini juga menghalangi jalannya menuju ke arah yang benar, yakni jalan yang disetujui Tuhan dengan seluruh kebenaran yang terkandung di dalamnya.

3. Kebebasan Manusia

Kebebasan dianggap sebagai anugerah paling fundamental dari Tuhan untuk manusia, merupakan persiapan awal sebagai khalifah dan karunia utama yang diberikan Tuhan sejak zaman primordial, memperkuat posisinya sebagai khalifah Tuhan. Namun, kebebasan itu memiliki batasan yang ditentukan oleh kemampuan manusia untuk membedakan antara benar dan salah, bukan untuk melanggar larangan.¹¹⁰ Kebebasan manusia dibatasi oleh norma-norma moral, menjadikannya makhluk yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihan sadar yang diambilnya, baik yang baik maupun yang jahat.¹¹¹ Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerima atau menolak petunjuk-Nya, dengan risiko yang harus ditanggung manusia sesuai dengan pilihannya. Melalui tindakan amalnya, manusia menciptakan keberadaan dan esensi dirinya, dan dalam amal yang ikhlas, manusia menemukan tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan melalui "pertemuan" dengan Tuhan dan meraih ridha-Nya.¹¹²

Mengenai kebebasan, terdapat janji primitif antara Tuhan

¹¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, hal. 20.

¹¹¹ Ali Syari'ati, *Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat*, terj. Afif Muhamad, cet.2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hal. 233.

¹¹² Nurcholish madjid, *Doktrin Islam dan Peradaban*, hal. 4

dan manusia bahwa manusia harus mengikuti jalan yang benar, yaitu dengan sepenuh hati menyembah Tuhan dan menolak jalan yang sesat. Contoh nyata adalah perjanjian antara Tuhan dan Adam, namun Adam dan Hawa tidak mampu menahan godaan setan sehingga melanggar larangan Tuhan dengan mendekati pohon terlarang dan mencicipi buahnya. Akibatnya, mereka diusir dari taman dengan kehinaan, memicu perseteruan antara manusia dan setan. Meskipun demikian, Tuhan yang Maha Pengasih memberikan petunjuk (kalimat) kepada Adam dan Hawa sebagai "pengaman spiritual" agar mereka dapat menggunakan kebebasan mereka dengan bijak. Mereka belajar memahami petunjuk tersebut, dan Tuhan kembali pada mereka. Petunjuk atau kalimat ini dianggap sebagai kelanjutan dan afirmasi dari perjanjian primitif. Al-Qur'an mencatat bahwa perjanjian ini juga dibuat dengan setiap individu manusia, keturunan Adam (Bani Adam), sebelum mereka dilahirkan ke dunia, sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka kepada Tuhan agar tidak menolak kewajiban mereka di Hari Pembalasan.¹¹³

Dikarenakan Tuhan tidak pernah memaksakan keyakinan kepada individu, maka manusia diberi kebebasan untuk memilih keyakinan atau agamanya. Penting untuk dicatat bahwa manusia memiliki sifat murni, sehingga secara naluriah mereka akan mencari jalan kembali kepada Tuhannya. Dalam melakukan ibadah kepada Tuhan, manusia menemukan kebahagiaan dan kehormatannya, seperti kegembiraan yang timbul karena berhasil menemukan kebenaran, yaitu kembali kepada Tuhannya. Prinsip kebebasan beragama ini mencakup menjaga segala bentuk ibadah keagamaan, baik itu yang berasal dari agama Yahudi, Kristen, Islam, dan semua bentuk ibadah yang dibangun untuk kepentingan agama. Hal ini karena nilai-nilai paling tinggi dalam kehidupan manusia diwujudkan melalui peribadatan.¹¹⁴

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*,

¹¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, hal. 27

Di Hari Kiamat, setiap manusia akan dihadapkan pada pengadilan oleh Allah untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama hidup di dunia. Setiap individu akan sibuk dengan urusan pribadinya sendiri, karena dosa dan amal baik seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Oleh karena itu, kehidupan yang utuh, integral, dan memenuhi peran kekhalfahan manusia yang universal di bumi bersumber dari kebebasan nurani. Ini merujuk pada kebebasan dari segala bentuk pemaksaan, bahkan jika pemaksaan tersebut dilakukan atas dasar kebenaran yang jelas benar dan baik. Seorang individu harus diberikan kebebasan untuk berekspresi, dengan kebebasan untuk menerima atau menolak hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, dengan kesiapan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul. Karena yang benar jelas berbeda dari yang salah, dan yang sejati pasti berlainan dari yang palsu. Manusia, dalam suasana kebebasan dan kejujuran hati nuraninya, akan mampu membedakan, menangkap, dan mengikuti apa yang benar dan yang salah, yang sejati dan yang palsu.¹¹⁵

Kebebasan, sebagai prinsip dasar dari terciptanya pengawasan dan pengimbangan, masih memerlukan kelanjutan dan penyempurnaan melalui jiwa, semangat, dan kemampuan untuk menahan diri serta tabah hati dalam menerima kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan pribadi. Hal ini mencakup kenyataan-kenyataan yang dapat membawa kebaikan bersama, dengan menyingkirkan egoisme dan mengutamakan kepentingan kolektif. Keterbukaan dan kebebasan yang sesungguhnya selalu memerlukan sikap bertanggung jawab.¹¹⁶

Kemakmuran, pengetahuan, dan kebebasan akan lebih memperkuat dampak langsung dari organisasi yang terotomatisasi dalam meningkatkan tingkat kemampuan masyarakat yang tinggi

72-73 ¹¹⁵ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*.(Jakarta: Paramadina, 1997), hal.

¹¹⁶ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, hal 78

dan terus-menerus berkembang, seperti kemampuan untuk menghasilkan barang-barang, menemukan fakta-fakta, dan mengorganisir kehidupan manusia menuju berbagai tujuan yang muncul. Salah satu tujuan tersebut termasuk pengembangan agama dan implementasinya dalam kehidupan.¹¹⁷

Kebebasan juga memiliki aspek positif, yang dinyatakan oleh Nurcholish Madjid sebagai "Dalam masyarakat bebas, tidak akan terjadi bahaya kelaparan," sebuah pernyataan optimis tentang dampak positif kebebasan. Pernyataan tersebut benar, setidaknya dalam dua konteks pemahaman. Pertama, kebebasan menciptakan mekanisme pengawasan sosial terhadap berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara. Kedua, suasana kebebasan menjadi pendukung utama bagi terciptanya iklim kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.¹¹⁸

B. Unsur Pembentukan Kemanusiaan dalam Pancasila

Pancasila dengan semua unsurnya membentuk suatu kesatuan yang utuh, dimana tidak boleh dan tidak dapat ada pemisahan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila haruslah utuh, tanpa memberikan tekanan yang tidak beralasan pada salah satu silanya. Meskipun demikian, untuk keperluan pendekatan praktis, kita dapat memahami setiap sila lebih rinci dan melihat kemungkinan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Menurut Cak Nur, setiap orang perlu menyadari bahwa antara sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang berfungsi sebagai perekat untuk keutuhan nilai ideologisnya. Dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat mencoba memahami makna

¹¹⁷ Budhy Munawar –Rachman, Elza Peldi Taher. @fileCaknur: *Banyak Jalan Munuju Tuhan*. hal. 93.

¹¹⁸ Budhy Munawar –Rachman, Elza Peldi Taher. @fileCaknur: *Banyak Jalan Munuju Tuhan*. hal. 95

nilai kemanusiaan yang terkandung dalam setiap sila secara lebih menyeluruh.¹¹⁹

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan konsistensi mutlak sebagai fondasi bagi seluruh permasalahan yang dihadapi Pancasila. Penting untuk dicatat bahwa banyak orang di Indonesia yang memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama dan sumber utama nilai-nilai Pancasila. Pemahaman ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan Tuhan adalah dasar yang mendalam bagi konsep nilai dan moral dalam Pancasila.¹²⁰ Oleh karena itu, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memegang peran sentral dalam memandu pandangan hidup dan sikap terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, Cak Nur mengutip pendapat Buya Prof. Dr. Hamka yang menggunakan perumpamaan tentang Pancasila sebagai bilangan 10.000, dimana angka 1 mewakili sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan empat angka nol berikutnya melambangkan empat sila berikutnya. Hamka menjelaskan bahwa jika angka 1 dihilangkan, maka deretan empat angka nol akan tetap memiliki nilai yang sama, menggambarkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan makna mutlak bagi Pancasila dan seluruh silanya dalam kehidupan manusia. Cak Nur menambahkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bagi dimensi-dimensi moral yang mendukung peradaban manusia. Konsep tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi pusat dan inti dari agama-agama yang diperkenalkan oleh para nabi, mulai dari nabi pertama hingga nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW.¹²¹

Jika tidak demikian, maka masyarakat akan berpaling menjadi sekuler. Sekularisme merupakan suatu doktrin yang

¹¹⁹ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 1997), hal. 239

¹²⁰ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 241.

¹²¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hal. 189.

dimulai dengan ajaran "Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar" (urusan duniawi) dan "berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan" (urusan ukhrawi). Dengan kata lain, sekularisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam urusan-urusan dunia. Segala urusan dunia harus diurus dengan metode-metode yang tidak bersumber dari Tuhan. Sekularisme adalah paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan duniawi manusia. Seorang yang sepenuhnya sekuler dan konsisten akan menjadi seorang ateis. Namun, seorang yang tidak sepenuhnya konsisten mungkin mempertahankan keyakinan pada Tuhan dan agama, tetapi tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam urusan dunianya, sehingga pada hakikatnya menjadi ateis dalam urusan duniawi. Dengan kata lain, dalam urusan duniawi, seorang yang bersifat sekuler pada dasarnya tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan, menjadikannya seorang ateis. Oleh karena itu, jika agama, khususnya Islam, menolak komunisme, itu terutama karena prinsip ateismenya. Sebab, ateisme cenderung berujung pada imperialisme. Seiring dengan teori dan praktiknya, seseorang yang memulai dengan menolak keberadaan Ke-Esa-an Yang Maha Tinggi (Tuhan) akan cenderung menolak nilai-nilai yang bersifat keagamaan.¹²²

Selain isu sekularisme, menurut Cak Nur, Indonesia juga bukanlah negara teokratis. Meskipun pernyataan ini mungkin membingungkan bagi sebagian orang dan sering ditekankan oleh pejabat negara, terutama Presiden Soeharto, hal ini menyiratkan bahwa Indonesia tidak bersifat teokratis atau tidak berdasarkan agama. Bagi mereka yang tidak memahami masalah ideologis bangsa ini, pernyataan tersebut mungkin terdengar aneh. Namun, pada kenyataannya, ini adalah pandangan mayoritas masyarakat Indonesia secara ideologis terhadap negara mereka. Bagi mereka yang memahami konteks ini, pernyataan tersebut mencerminkan adanya kompromi dan kesepakatan yang rumit antara kelompok

¹²² Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, hal. 190

nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler dalam hal ideologi resmi negara.¹²³

Pada sila pertama ini, pengakuan akan keberadaan Tuhan menciptakan dasar yang mendalam bagi konsep nilai dan moral dalam Pancasila. Ia menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan bersumber dari pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektifnya, Sila Pertama tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga memegang peran sentral dalam membimbing pandangan hidup dan sikap terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mengakui keberadaan Tuhan, Cak Nur merinci bahwa Pancasila memandang manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki dimensi moral yang mendukung peradaban. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Sila Pertama mencakup aspek spiritual dan moral yang menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter dan sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam memahami sila Perikemanusiaan, yang sangat penting untuk disadari adalah kebutuhan akan asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik, selalu mencari dan berusaha mencapai kebenaran dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan nurani manusia yang merupakan inti dari kesucian asalnya yang sejati. Kebenaran dan kebaikan merupakan elemen hakiki dari pemahaman akan makna dan tujuan hidup yang pada akhirnya membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kejahatan dan kepalsuan akan menyebabkan penderitaan. Karena mendasarnya hakikat kemanusiaan, setiap individu secara alamiah harus memberikan penghormatan dan kehormatan kepada sesamanya dengan memperlakukannya dengan baik, benar, adil, dan beradab.

Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa tindakan berbuat baik kepada satu individu memiliki nilai yang setara dengan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Pernyataan ini ditarik sebagai

¹²³ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 3-4

kesimpulan dari kisah pembunuhan antara Qabil dan Habil, yang keduanya merupakan anak Nabi Adam. Motivasi di balik pembunuhan tersebut adalah dengki atau iri hati, karena persembahan korban Habil diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Qabil ditolak. Penting untuk dicatat bahwa penerimaan Tuhan terhadap korban tersebut disebabkan oleh ikhlasnya Habil, sementara Qabil tidak melakukannya dengan ikhlas. Kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap ikhlas dalam berbuat baik.¹²⁴

Peristiwa tersebut memiliki signifikansi besar sebagai bahan refleksi atau renungan karena tidak pernah menjadi doktrin resmi dalam Islam. Ini berarti ayat tersebut tidak pernah diuraikan secara rinci dalam teologi, syariat, dan bidang lainnya. Walaupun demikian, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa nilai kemanusiaan setiap individu bersifat universal, sehingga kejahatan terhadap seseorang tidak hanya merupakan kejahatan pribadi, melainkan juga kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Sebaliknya, kebaikan yang ditunjukkan kepada seseorang juga tidak hanya menjadi kebaikan bagi individu tersebut, tetapi juga menjadi kebaikan bagi kemanusiaan secara universal.¹²⁵ Karenanya, kebenaran di antara individu manusia harus dijaga dan ditegakkan agar tidak kehilangan kebermanfaatannya umum yang diakui secara luas dalam masyarakat.¹²⁶

Dalam pemahaman sila kedua menurut Nurcholis Madjid, nilai kemanusiaan tercermin dari asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik dan selalu mencari kebenaran dan kebaikan. Nurani manusia dianggap sebagai inti dari kesucian asalnya yang sejati, dengan kebenaran dan kebaikan menjadi elemen hakiki yang membawa makna dan tujuan hidup

¹²⁴ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 2197

¹²⁵ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 2197-2198

¹²⁶ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, hal. 242-243

menuju kebahagiaan. Al-Quran menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa berbuat baik kepada satu individu setara dengan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Kisah Qabil dan Habil dari Al-Quran memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap ikhlas dalam berbuat baik, dan meskipun tidak menjadi doktrin resmi dalam Islam, nilai kemanusiaan dijelaskan sebagai sesuatu yang bersifat universal. Tindakan kejahatan terhadap seseorang tidak hanya dianggap sebagai kejahatan pribadi, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Sebaliknya, kebaikan yang ditunjukkan kepada individu juga dianggap sebagai kebaikan bagi kemanusiaan secara universal. Dalam konteks ini, Nurcholis Madjid menekankan perlunya menjaga dan menegaskan kebenaran di antara individu manusia agar tidak kehilangan kebermanfaatannya umum yang diakui secara luas dalam masyarakat.

3. Persatuan Indonesia

Kesatuan adalah prinsip yang sangat penting dan krusial. Kesatuan memberikan kerangka untuk mewujudkan nilai-nilai tinggi kehidupan. Tanpa adanya kesatuan, implementasi nilai-nilai tersebut tidak akan tercapai dengan mudah. Karena kesatuan merupakan prinsip yang esensial untuk mewujudkan nilai-nilai tinggi dan menjadi syarat mutlak untuk pelaksanaannya, maka perannya menjadi setara pentingnya dengan nilai-nilai tersebut.

Sementara itu, esensi dari nilai Persatuan Indonesia harus diartikan dalam konteks kesatuan dengan semangat nasional, *Bhinneka Tunggal Ika*. Semangat tersebut mencakup prinsip dasar bahwa negara Indonesia adalah sebuah masyarakat yang beragam dan majemuk. Dengan dasar keberagaman ini, dibangunlah kesatuan yang bersifat dinamis. Kesatuan yang dinamis, yang tidak bersifat statis, mengandung makna bahwa persatuan dapat dicapai dalam keragaman, dengan pemahaman yang mengakui hak untuk berbeda, namun tetap dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi, didasarkan pada kebebasan yang bertanggung jawab, yang artinya kebebasan di dalam kerangka persatuan, dan menghasilkan kesatuan melalui dinamika kebebasan yang sah.¹²⁷

Dikenal sebagai "kebebasan yang bertanggung jawab" atau "sah" karena dinamika masyarakat tidak boleh membawa bangsa ke dalam keadaan kacau (chaos), yang malah akan menghilangkan ruang untuk mewujudkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan tidak dapat tercapai dalam masyarakat yang kacau. Secara logis politis, kekacauan dapat memberikan kesempatan bagi munculnya "orang kuat" atau diktator yang akan merampas kebebasan dengan dalih bahwa mereka akan menangani kekacauan tersebut.¹²⁸

Karena manusia memiliki sifat alamiah yang berbeda-beda sesuai dengan sunnatullah, sangatlah masuk akal bahwa ajaran Allah mengenai persaudaraan berdasarkan iman diberikan dalam konteks pluralitas, bukan monolitik. Karena hukum perbedaan yang ditetapkan Allah untuk umat manusia juga berlaku di antara komunitas kaum beriman sendiri. Oleh karena itu, kaum beriman terdiri dari individu-individu dengan latar belakang biografi, sosial, dan budaya yang beragam.¹²⁹

Nilai kemanusiaan dalam Sila Ketiga "Persatuan Indonesia" sangat menekankan pentingnya bekerja bersama dan memahami perbedaan. Kesatuan dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan kebaikan dan nilai-nilai penting dalam hidup. Bagi Nurcholis Madjid, Indonesia yang bersatu adalah tempat di mana keberagaman diakui dan dihargai, tetapi juga diatur dengan baik. Ide kebebasan juga dibahas, dengan penekanan bahwa kebebasan harus dijalani dengan tanggung jawab, agar tidak ada kekacauan

¹²⁷ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, hal. 243

¹²⁸ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 2628

¹²⁹ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital* (Jakarta: Mizan, 2006), 2628

yang dapat dimanfaatkan oleh penguasa otoriter. Nurcholis Madjid juga menyoroti bahwa sebagai manusia, kita berbeda-beda, dan itulah yang membuat kita istimewa. Pesannya adalah bahwa dalam persatuan, kita dapat hidup bersama dalam damai, meskipun kita berbeda.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini sering diinterpretasikan sebagai sila demokrasi. Sila kerakyatan ini juga tidak dapat dipisahkan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia yang dinamis (persatuan yang diwujudkan dalam kerangka makna dan semangat Bhinneka Tunggal Ika). Jika keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, benar-benar menciptakan karakter luhur yang tercermin dalam nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan pola interaksi sosial yang saling menghormati dan menghargai, maka salah satu hasil dari nilai dan sikap tersebut adalah kesiapan untuk mengakui kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan terhadap kekuasaan rakyat dimulai dengan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk bersuara. Sebagai imbalannya yang masuk akal, pengakuan tersebut diikuti oleh pengakuan terhadap kewajiban setiap individu untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain. Hak untuk menyampaikan pendapat setiap orang didasarkan pada nilai kemanusiaan universal yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk kebenaran dan kebaikan. Di sisi lain, kewajiban untuk mendengar dan memperhatikan pendapat orang lain didasarkan pada asumsi bahwa manusia terkadang dapat keliru atau alpa. Dinamika tarik-menarik antara hak dan kewajiban yang tak terpisahkan ini menciptakan mekanisme musyawarah.¹³⁰

¹³⁰ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, hal. 244

Musyawarah mencerminkan bagaimana komunitas beriman menyelesaikan urusan sosial mereka. Oleh karena itu, sangat baik bahwa negara kita, yang didasarkan pada Pancasila, menetapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai metode penyelesaian masalah kemasyarakatan bersama. Hal ini sesuai dengan ajaran agama, yang menyatakan bahwa "ra'sul hikmah al-masyurah" (pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah). Bahkan, Rasulullah sendiri, dalam urusan kemasyarakatan, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan musyawarah dan teguh melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan bertawakal kepada Allah.¹³¹

Dalam konteks tersebut, masyarakat kaum beriman digambarkan dalam kitab suci sebagai komunitas yang, dalam semua urusannya, mengambil keputusan melalui musyawarah. Masyarakat yang dipimpin oleh Nabi, begitu pula masyarakat yang dipimpin oleh empat khalifah yang bijaksana, didirikan berdasarkan prinsip musyawarah.¹³²

Oleh karena itu, dalam konteks logika musyawarah, demokrasi senantiasa memerlukan kesediaan tulus dari semua pihak yang terlibat untuk bertemu pada titik kesamaan kebaikan bagi semua. Semangat memberi dan menerima dalam demokrasi dijiwai oleh pandangan optimis dan positif terhadap kemanusiaan. Pentingnya pandangan egalitarianisme atau kesetaraan manusia menjadi landasan kuat untuk demokrasi dengan musyawarah yang benar, dan hal ini tidak dapat terwujud jika ada stratifikasi sosial yang kaku dan *a priori* dalam sistem paternalistik dan feodalistik.¹³³

Paparan tersebut menunjukkan bahwa Nurcholis Madjid menjelaskan nilai kemanusiaan melalui konsep demokrasi. Dia menyatakan bahwa sila ini adalah dasar demokrasi, yang tidak

¹³¹ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 8.

¹³² Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital*, 2135

¹³³ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital*, 2135-2136

bisa dipisahkan dari nilai-nilai lainnya dalam Pancasila. Madjid menghubungkan pengakuan terhadap kekuasaan rakyat dengan nilai-nilai baik yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan. Hak setiap warga untuk berpendapat diimbangi dengan kewajiban mendengarkan pendapat orang lain, dan ini membentuk cara kita menyelesaikan masalah bersama, yang disebut musyawarah. Musyawarah adalah cara seseorang mencapai kesepakatan dengan mendengarkan dan menghormati pendapat semua orang. Madjid menekankan bahwa demokrasi memerlukan kemauan tulus untuk mencapai kebaikan bersama, dengan pandangan bahwa semua orang setara sangat penting. Dalam demokrasi, setiap orang harus siap memberi dan menerima, dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki nilai yang sama. Kesetaraan manusia adalah dasar penting untuk demokrasi yang sejati, yang tidak bisa terjadi jika ada perbedaan kelas atau status sosial yang keras dan tidak adil.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini dianggap sebagai tujuan hidup bagi masyarakat yang ingin menjalani kehidupan bernegara dan berkomunitas dengan penuh keimanan dan taqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan (sila kedua), menjunjung tinggi persatuan nasional (sila ketiga), dan mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat melalui mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Dalam konteks ini, keadilan tidak berarti kesetaraan kepemilikan harta atau pendapatan, seperti semboyan "sama rata sama rasa" yang pernah dipopulerkan oleh orang-orang PKI. Akan tetapi, keadilan yang dimaksud adalah pemerataan hasil pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terwujudnya keadilan ini bergantung pada pelaksanaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari keempat sila yang lainnya.¹³⁴

¹³⁴ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, hal. 245-246

Dalam Al-Quran, terdapat banyak penjelasan mengenai masalah keadilan dalam berbagai konteks. Selain kata "adil" (Arab: *'adl*) yang memiliki berbagai nuansa arti keadilan, Kitab Suci juga menggunakan kata-kata "*qisth*" dan "*wasth*". Beberapa ahli tafsir juga mengaitkan sebagian makna dari kata "*mîzân*" dengan pengertian "*'adl*". Semua definisi dari berbagai kata tersebut berpusat pada ide umum tentang "sikap tengah yang berkeimbangan dan jujur".¹³⁵

Semangat ini merupakan kelanjutan dari aspirasi dan pemikiran bangsa-bangsa Semit, sebab mereka telah mengalami pemerintahan yang selalu dihadapkan pada godaan ke arah kezaliman. Dalam konteks yang lebih luas, saat budaya bernegara ini menyebar ke bangsa-bangsa Arya, terutama Persia atau Iran, aspirasi terhadap keadilan sangat kental mewarnai pemikiran kenegaraan dalam budaya Irano-Semitik. Oleh karena itu, cita-cita keadilan yang sangat kuat dalam Islam dapat dianggap sebagai puncak dari perkembangan budaya Irano-Semitik tersebut, yang secara historis-sosiologis telah diwujudkan melalui misi suci para nabi dan rasul.¹³⁶

Nilai-nilai kemanusiaan pada sila ini bersatu dalam prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan untuk semua warga negara. Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan, mengakui keberagaman sebagai kekayaan, dan mengupayakan pembangunan yang merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seluruh sila dalam Pancasila memberikan fondasi bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan, menciptakan ruang bagi partisipasi semua warga dalam pembangunan negara yang sejahtera.

¹³⁵ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital*, 1289

¹³⁶ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Jilid 3 Edisi Digital*, 1290

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Islam, ditekankan bahwa agama ini membawa dampak positif dalam masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Tingkat ketaatan yang tinggi kepada Allah mencerminkan usaha untuk menciptakan masyarakat yang penuh kebajikan dan moralitas. Pengetahuan tentang syari'at memainkan peran penting dalam membimbing perilaku umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan dengan mendorong saling bantu-membantu dan berbagi.

Ajaran Islam sebagai fondasi kemanusiaan, menurut Nurcholish Madjid, menambah dimensi filosofis dengan konsep ketuhanan, persamaan hak, dan prinsip kebebasan, yang menjadi landasan untuk mewujudkan semangat kemanusiaan. Prinsip ketuhanan menekankan adanya Tuhan sebagai sumber dan tujuan kehidupan, persamaan hak dan martabat manusia menegaskan kesetaraan di antara individu, dan prinsip kebebasan menekankan pentingnya masyarakat yang adil dan terbuka. Islam juga menegaskan kebebasan manusia sebagai anugerah dari Tuhan, namun kebebasan tersebut memiliki batasan moral yang ditentukan oleh kemampuan manusia untuk membedakan benar dan salah. Cak Nur menegaskan bahwa kebebasan ini memerlukan tanggung jawab dan keterbukaan untuk mencapai kebenaran. Kebebasan juga dianggap sebagai pendorong untuk mencapai kemakmuran dan pengetahuan, serta memperkuat dampak positif dalam masyarakat bebas.

Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam setiap silanya, membentuk dasar ideologis yang utuh dan konsisten. Nilai-nilai tersebut melibatkan pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dalam keberagaman, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pancasila memandang pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai dasar yang mendalam bagi konsep nilai dan moral. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memegang peran sentral dalam membimbing pandangan hidup dan sikap terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai kemanusiaan tercermin dalam asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik, selalu mencari kebenaran dan kebaikan. Pemahaman ini mengakui keberagaman sebagai kekayaan dan menekankan pentingnya sikap ikhlas dalam berbuat baik.
3. Persatuan Indonesia: Kesatuan sebagai prinsip krusial membentuk kerangka untuk mewujudkan nilai-nilai tinggi kehidupan. Persatuan Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika menekankan keberagaman yang diatur dengan baik, memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Pancasila mengakui kekuasaan rakyat, yang dimulai dengan hak setiap warga negara untuk bersuara. Musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah bersama mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan, sejalan dengan ajaran agama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Keadilan dalam Pancasila bukan hanya kesetaraan kepemilikan harta atau pendapatan, melainkan pemerataan hasil pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pancasila memberikan fondasi bagi tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan, menciptakan ruang partisipasi semua warga dalam pembangunan negara yang sejahtera.

Dengan demikian, keseluruhan konsep Pancasila menciptakan pandangan holistik tentang kemanusiaan, mencakup dimensi

spiritual, moral, sosial, dan politik untuk membentuk fondasi bangsa Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan di atas, maka perlu kiranya melihat dan menggali kembali pemikiran Nurcholis Madjid mengenai pembahasan kemanusiaan, karena tentu banyak sekali peran atau manfaat yang dapat kita temukan serta terapkan untuk kehidupan ini. Peneliti setelah ini dapat melanjutkan dalam bidang lain dengan pembahasan humanisme secara spesifik, seperti kritik atau respon terhadap aliran humanisme sekuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: Wijaya, 195
- Ai-Fandi, Haryanto, *Desain Pembelajaran yang Demokratis & Humanis*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011
- Airlam, Laurensius, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara”, *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, 2018
- Arifin, H.M., *Ilmu Pendidikan Islam “Tinjau Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Arifin, Syamsul, *Spiritualitas Islam Dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Sypress, 1996
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Bahrudin dan Moh Makin, *Pendidikan Humanistik : Konsep, Teori, dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2011.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, penerjemah Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999
- Boisard, Marcel A.. *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1980
- Budiningsih, C. Asri, “Strategi Pembelajaran Nilai yang Humanis”, *Dinamika Pendidikan : Majalah Ilmu Pendidikan*, No. 2, 2010
- Cassirer, Ernst, *The Renaissance Philosophy of Man*, Chicago: The University of Chicago Press, 1948
- Dalton, Bill, *Indonesia Handbook*, Chico, California: Moon Publications, 1982
- Edrin, Wiligis Eduardus Olak Wuwur, “Pancasila dalam Perspektif Cak Nur”, dalam Budhy Munawar-Rachman, dkk, *Pemikiran Islam*

- Nurcholis Madjid*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022
- Fealy, Greg, *Voices of Islam in Southeast Asia: a Contemporary Sourcebook*, Singapore: ISEAS Publications, 2006
- Hadimulyo, *Manusia Dakam Perspektif Humanisme Agama Pandangan Ali Shariati*, dalam *Insan Kamil*, Jakarta : PT PustakaGrafiti Press, 1987
- Hardiman, F.Budi, *Humanisme dan Sesudahnya “Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia”* Jakarta : Prima Grafika, 2012
- Hatta, Mohammad, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Ui Press, 2006
- Hidayatulloh, Zaki, *Islam dan Humanisme Menurut Sayyid Hossein Naser*, Respository IAIN Sumut, 2012
- Hornby, Albert Sydney, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, New York: Oxford Univercity Press, 2010.
- Huda, Sokhi, *Humanism Islam: Potret Romantic Dan Responya Terhadap Modernism*
- Ismaun, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Jakarta: C.V. Carya Remaja, 1981
- Johns, Anthony H., “Islam in the Malay World,” dalam Raphael Israeli dan Anthony H. Johns, eds., *Islam in Asia*, Jerusalem: The Magnes Press, 1984.
- Kaderi, Alwi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015
- Kaderi, Alwi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Banjarmasin, Antasari Press
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004
- Kartono, Kartini, *Metodologi Research*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kohlberg, Lawrance, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Terj. John de Santo dan Agus Cremers, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 84
- Ma’arif, Ahmad Syafii, *Al-Qur’an, Relitas Social Dan Limbo Sejarah*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 2013
- Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 1997

- Madjid, Nurcholis, *Prof. Dr. Nurcholish Madjid : Jejak Pemikiran Dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Madjid, Nurcholis, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan kemoderanan*, cet. 3, Jakarta: Paramadina, 1995
- Malik, Dedy Djamiluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 122
- Mangunhardjana, A., *Isme-Isme dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- MPRRI, *Bahan Tayangan Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2011
- Mu'ammarr, Arfan, *Pendidikan Karakter "Strategi Internalisasi Values dan Kajian Teoris*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Munawar, Budhy, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019
- Murchland, Bernard, *Humanisme dan kapitalisme "Kajian Pemikiran Moralitas dan Etika Ekonomi"*, Yogyakarta : Basabasi, 2019
- Murtadha, Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi. Islam tentang Jagat Raya*, terj. Ilyas Hasan. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002
- Musthofa, "Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila", *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 24, No. 1, 2017
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

- Nasotion, Harun, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998
- Ningsih, Rahmah, *Pancasila Sebagai Sistem Etika*, E. Learning, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Bogor: Kencana, 2003
- Raharjo, Dawam, *Intelktual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993
- Rajabi, Mahmoud, *Insan Syenasi*, Terj. Yusuf Anas, *Horison Manusia*, Jakarta: Perbit al Huda, 2006
- Rakhmat, Jalaluddin, dkk, *Nurcholis Madjid: Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 2004
- Rianto, Harsih, "Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 3, 2016
- Rohmah, Mareta Inayatur, *Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Menurut Nurcholis Madjid*, Skripsi: UIN Yogyakarta, 2017
- Rosowulan, Titis, *Aspek-Aspek Humanis Pemikiran Keagamaan Hamka*
- Salam, Burhanudin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta : Renika Cipta, 2000
- Smith, Huston, *Forgotten Truth*, San Francisco: HarperCollins, 1992
- Sofyan, Ahmad A. dan Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Subekti, Slamet, "Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi", *Humanika*, Vol. 17, No. 1, 2013
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997

- Suhandi, Awalia Marwah dan Dini Angraeni Dewi, “Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kalangan Generasi Muda”, *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Suhandi, Awalia Marwah dan Dinie Angrani Dewi, “Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme Menurut Pemikiran Budi Hardiman Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kalangan Generasi Muda”, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Suhandi, Awalia Marwah, Dini Angraeni Dewi, “Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kalangan Generasi Muda”, *Jurnal Evaluasi dan Pembelajarani*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Sunarso, *Pelajaran Pedidikan Kewarganegaraan*, Bogor : Yudistira, 2009
- Supriyono dan Intan Kusumawati, “Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis”, *AoEJ: Academy of Education Journal*, Vol. 11, No. 1, 2020
- Surip, Ngadino,dkk, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, Yogyakarta: Andi, 2015
- Suseno, Frans Magnis, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia, 1991
- Suteng, Bambang, *Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Syari’ati, Ali, *Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat*, terj. Afif Muhamad, cet.2, (Bandung: Pustaka Hidayah,1996.
- Syarifuddin dan Zuhra Latifa, Krisis Humanisme Dalam Novel “Al-Dhill Al-Aswad Karya Najib Kailani (Kajian Humanisme Abraham Maslow)”, *An-Nahdah Al-'Arabiyah; Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, vol. 2, No. 1, 2022
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Hingga James*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010.

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan UUD 1945 Indonesia Vol. II dan III*, Jakarta: Siguntang, 1971

Website:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/humanis>

Liputan6, “Cak Nur Meninggal Dunia”, di akses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/108166/cak-nur-meninggal-dunia>

Muhadam, “Ancaman Krisis Nilai”, diakses melalui <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1888>